

SKRIPSI
PENGELOLAAN LOGISTIK KEMANUSIAAN MELALUI LINTAS
REGIONAL BAGI BENCANA ALAM DI KOTA



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**PENGELOLAAN LOGISTIK KEMANUSIAAN MELALUI LINTAS
REGIONAL BAGI BENCANA ALAM DI KOTA
MAKASSAR DAN KABUPATEN GOWA**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan (S. IP)



Disusun dan diajukan oleh
AGUNG DANASWARA DAUD
Nomor stambuk: 105641101420

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Lintas
Regional Bagi Bencana Alam di Kota
Makassar dan Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Agung Danaswara Daud
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101420
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Pembimbing I Menyetujui Pembimbing II

J. Karso
Dr. Junaedi Karso, S.H., M.H., M.Si

Rudi Hardi
Rudi Hardi, S.Sos., M.Si



Dekan
H. Ihyani Malik
Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ahmad Harakat
Ahmad Harakat, S.IP., M.H.I
NBM: 1207163

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0257/FSP/A.4-II/V/45/2024 Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari 08 Mei 2024.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Agung Danaswara Daud
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101420
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima saksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 05 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan,

Agung Danaswara Daud

ABSTRAK

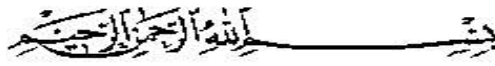
Agung Danaswara Daud. 2024. Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Junaedi Karso dan Rudi Hardi).

Bencana alam merupakan ancaman yang sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Penanganan bencana alam memerlukan sistem logistik yang efektif dan efisien untuk menyediakan bantuan kepada korban. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pengelolaan logistik kemanusiaan melalui lintas regional, di mana Kota Makassar dan Kabupaten Gowa bekerja sama dalam mengatasi bencana alam yang terjadi di wilayah mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Logistik Kemanusiaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi logistik kemanusiaan dalam situasi darurat. Implikasi penelitian ini adalah perlunya koordinasi lintas regional yang kuat antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dalam mengelola logistik kemanusiaan untuk bencana alam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan logistik kemanusiaan melalui lintas regional bagi bencana alam di wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem logistik kemanusiaan di masa mendatang.

Kata Kunci: Pengelolaan Logistik, Bencana Alam



KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa.”** skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di universitas muhammadiyah makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Junaedi Karso, S.H., M.H., M.Si selaku pembimbing I dan Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada bapak H. Daud Mustafa Kasim dengan ibu Dra. Hj. Husnah Lanu, M.Pd selaku kedua orang tua saya terimakasih bapak, ibu telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral, maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
2. Kepada Ayahanda Dr. Junaedi Karso, S.H., M.H., M.Si dan Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos., M.Si terimakasih telah membimbing.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelolah fakultas dengan sebaik-baiknya.
4. Ayahanda Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ibunda Nur Khaerah, S.IP., M. IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Kepada kakanda kakanda alumni dan dewan senior di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) terimakasih atas arahan dan bimbingannya.
8. Saudara-saudara seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP).
9. Buat saudara-saudariku tercinta, dan teman-temanku serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, serta bantuan yang tiada ternilai baik moral, maupun materil kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar 22 Januari 2024

Yang menyatakan

Agung Danaswara Daud

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori Dan Konsep	12
C. Pengelolaan Logistik Kemanusiaan	16
D. Konsep Kolaborasi	21
E. Kerangka Pikir	31
F. Fokus Penelitian	33
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informasi Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Keabsahan Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
B. Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa	81
C. Pembahasan.....	98
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
RIWAYAT HIDUP.....	120



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kejadian Bencana.....	3
Tabel 2.3 Kerangka Pikir	33
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.2: luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2024	42
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2024.....	45
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.....	46
Tabel 4.5 Nama dan Jabatan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.....	46
Tabel 4.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024	53
Tabel 4.7 Data Kejadian Bencana Alam Banjir, Genangan Air dan Angin Kencang Kota Makassar Tahun 2023	57
Tabel 4.9 luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	66
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	70
Tabel 4.11 Struktur Organisasi Unsur Pelaku Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa Berdasarkan	71
Tabel 4.12 Nama dan Jabatan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	72
Tabel 4.13 Data bencana Alam Tahun 2023	78
Tabel 4.14 Sumber Dana Bantuan Bencana Dari Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2024	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu Menggunakan Aplikasi Vosviewer.....	8
Gambar 2.2 Manfaat Kolaborasi	31
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar.....	42
Gambar 4.8: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan logistik bantuan bencana sangat bergantung pada bagaimana para pelaku penanggulangan bencana baik itu lembaga maupun instansi pemerintahan dalam menerapkan manajemen logistik bantuan penanggulangan bencana. Logistik adalah unsur yang paling penting dalam setiap upaya bantuan kemanusiaan, dan bagaimana cara kita mengelola logistik bantuan kemanusiaan akan menentukan apakah operasi penanggulangan bencana tersebut sukses atau gagal (Van Wassenhove, 2006). manajemen logistik ini menjadi sangat penting karena dalam situasi tanggap darurat logistik menjadi kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan baik oleh korban bencana maupun para relawan dan petugas kebencanaan dalam menghadapi situasi tanggap darurat, oleh karena itu diperlukan manajemen yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengelola logistik bantuan bencana ini.

Pengertian bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam rangka penanggulangan bencana telah ditetapkan Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan agar pengelolaan logistik dan peralatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu dan akuntabel. Sementara itu, pergudangan merupakan bagian dari mata rantai pasokan, karena meliputi penerimaan, penanganan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin (Hidayat, 2018).

Bencana dan tindakan deskriptif menuntut upaya logistik yang lebih tinggi dalam hal pengetahuan dan biaya karena kejadian bencana mendadak memerlukan respon yang sangat penting cepat di daerah-daerah yang berdampak bencana. Berbagai jenis bencana 3 perlu dikelola dengan cara pendekatan solusi yang berbeda. Logistik adalah unsur yang paling penting dalam setiap upaya bantuan kemanusiaan atau bantuan bencana dan bagaimana cara untuk mengelola logistik bantuan kemanusiaan akan menentukan apakah operasional logistik bencana tersebut sukses atau gagal, Van Wassenhove (2006). Namun demikian logistik juga menjadi aktivitas yang paling mahal dari setiap bantuan bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Peraturan ini menyebutkan mengenai berbagai bentuk kerjasama yang bisa dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bidang, termasuk logistik.

Provinsi Sulawesi Selatan harus menjadi lebih tangguh dalam mendukung penanganan darurat bencana, terutama di wilayah Timur Indonesia, agar dapat berjalan dengan lebih cepat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pelaku kebencanaan di bidang logistik, yaitu dengan membentuk kluster logistik di Provinsi Sulawesi Selatan. Memperhatikan hal tersebut Tahun Anggaran 2021 Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lokasi pelaksanaan Pensamoingan pembentukan kluster logistik.

Dari hasil observasi di lapangan Salah satu daerah di Indonesia yang sering terjadi bencana yaitu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa bencana yang sering terjadi memerlukan penanganan dalam menghadapi berbagai jenis bencana, dalam hal ini dilakukan berdasarkan penilaian ancaman bencana dengan identifikasi jenis ancaman, data sejarah kejadian bencana dan hasil kajian para pakar tentang potensi bencana di suatu daerah. Berikut data kejadian bencana di Kabupaten Gowa dari tahun 2018 sampai 2022.

Tabel 1.1 Data Kejadian Bencana Tahun 2022.

No	Tahun Kejadian	Jenis bencana			Total Bencana	Korban	Kerusakan
		banjir	longsor	Angin Putting Beliung			
1.	2018	0	0	1	1	140	28
2.	2019	1	0	1	8	3	7

3.	2020	1	1	0	16	2240	11
4.	2021	0	2	0	2	30	22
5.	2022	1	0	0	9	250	0

Sumber: Data Informasi Badan Nasional penanggulangan bencana, (BNPB) 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kejadian bencana terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun belakangan ini adalah terjadi pada tahun 2019. Menghadapi berbagai peristiwa bencana pemerintah telah melakukan upaya dengan menetapkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi pedoman pengaturan dalam setiap perencanaan maupun aksi yang akan di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi bencana. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana yaitu prabencana yang dilakukan pada saat tidak terjadi bencana dan saat sedang dalam ancaman potensi bencana; Tanggap darurat dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana; dan Pascabencana saat setelah terjadi bencana.

Dari semua tahap penanggulangan bencana, tanggap darurat menjadi masa paling krusial yang menentukan besar dampak kejadian bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pengurusan pengungsi, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan prasarana dan sarana (UU No.24 Tahun 2007). Upaya penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat ini sebenarnya telah melibatkan banyak pihak seperti halnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia, Dinas

Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia (PMI), Satpol PP, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Banyak pihak dari berbagai lembaga ini semestinya penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat bisa terlaksana dengan baik.

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disingkat BNPB yang merupakan wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana yang berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sedangkan BNPB memiliki cabang di setiap provinsi yang disebut BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD adalah pra dan pasca bencana alam. Untuk proses penanggulangan pasca bencana alam meliputi penanganan pengungsi dan pendistribusian logistik bantuan bencana alam.

Demikian ini proses pendistribusian bantuan ke posko posko bencana alam dari pemerintah, instansi dan masyarakat sekitar seringkali kurang merata, sedangkan masih banyak korban lain yang belum mendapatkan bantuan. Penyebab kurang meratanya bantuan antara lain terbatasnya informasi lokasi korban, dan belum memiliki sistem pendataan kebutuhan untuk para korban yang nantinya dapat mempermudah petugas bencana alam, instansi dan masyarakat untuk mengetahui lokasi dan kebutuhan korban di masing-masing posko bencana alam. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Pengelolaan Logistik Kemanusiaan

Melalui Kolaborasi Lintas Regional Bagi Pengungsi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kontribusi aktor-aktor terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional, dalam kolaborasi lintas regional untuk pengelolaan logistik kemanusiaan?
2. Apa hambatan dan tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan logistik kemanusiaan bagi pengungsi bencana alam di wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan kontribusi aktor-aktor terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional, dalam kolaborasi lintas regional untuk pengelolaan logistik kemanusiaan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan logistik kemanusiaan bagi pengungsi bencana alam di wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan di capai pada penelitian ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut:



1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi para pengambil kebijakan ditingkat daerah Kabupaten Gowa Dan Kota Makassar dalam Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Kolaborasi Lintas Regional Bagi Pengungsi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan wawasan bagi masyarakat dalam Pengelolaan Logistik Kemanusiaan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan bahan literatur, referensi, informasi, serta pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca mengenai pentingnya sebuah Kolaborasi pengelolaan logistic kemanusiaan bagi pengungsi bencana alam di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa.



Berdasarkan hasil penelusuran *vosviewer* di atas peneliti menyimpulkan bahwa saat ini belum banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang *Logistics Management Collaboration* yang mengacu pada *Natural disaster refugees* yang menganalisis bagaimana kolaborasi antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa mengenai pengelolaan logistik kemanusiaan.

Peneliti menjadikan sebagai bahan pijakan referensi peneliti terdahulu, maka dari itu peneliti membahas tentang *Collaboration in humanitarian logistics management for natural disaster refugees*.

Beberapa hasil penelitian yang relevan mengenai Kolaborasi pengelolaan logistik kemanusiaan bagi pengungsi bencana alam di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa diantaranya yaitu:

1. (Moh. Apriawan 2016) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Penentuan Prioritas Pengendalian Logistik Bencana Di Sulawesi Tengah” Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa Kelima faktor yang mempengaruhi Penerapan Manajemen Logistik Bencana di Sulawesi Tengah yakni, Sumber Daya Manusia (SDM), Situasi Ketidakpastian, Kolaborasi dan Kerjasama, Sarana Prasarana, dan Pendanaan faktor Sumber Daya Manusia adalah Prioritas Utama dalam Penangan Logistik bencana di Sulawesi Tengah dimana pelatihan adalah sub kriteria yang paling berpengaruh terhadap peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada masing-masing penelitian meneliti tentang Analisis Penentuan Prioritas

Pengendalian Logistik Bencana Di Sulawesi Tengah sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu itu lebih fokus menjelaskan tentang ekonomi kreatif sedangkan penelitian saya lebih fokus pada Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Kolaborasi Lintas Regional Bagi Pengungsi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa.

2. (Aminah. 2020) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Logistik dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Di BPBD Kabupaten Sumbawa 2018” Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa Kegiatan pengelolaan logistik yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sumbawa belum memiliki rencana kontijensi khusus gempa sehingga penanganan logistik yang dilakukan dilapangan seadanya sehinggaperlunya dibuat rencana kontijensi lainnya yang memuat bencana gempa. Sepanjang melakukan kegiatan pengelolaan logistik saat penanganan darurat gempa 2018, BPBD Kabupaten Sumbawa sebagian besar telah mengikuti peraturan terkait logistik. Pengawasan menjadi indikator yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang terlibat, karena kurangnya koordinasi dari pihak pendonor dalam melakukan pencatatan bantuan logistik yang diberikan langsung ke suatu wilayah tertentu tanpa melakukan pelaporan kepada BPBD menjadi penghambat kelancaran operasi pengelolaan logistik. Sehingga pengawasan dan pengendalian dengan teliti dan obyektif perlu ditingkatkan lagi agar tujuan pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana dapat tercapai. Serta

perlu dilakukan pengusulan penambahan kendaraan distribusi bantuan agar pengelolaan logistik dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada masing-masing penelitian meneliti tentang Analisis Pengelolaan Logistik dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Di BPBD Kabupaten Sumbawa 2018, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu itu lebih fokus menjelaskan tentang ekonomi kreatif sedangkan penelitian saya lebih fokus pada Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Kolaborasi Lintas Regional Bagi Pengungsi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa.

3. (Daswati. 2019) dalam penelitian yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Integrated Community Shelter Pasca Bencana Di Kota Palu” Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, penelitian ini memberikan empat kesimpulan yang dapat diberikan terkait dengan Collaborative Governance dalam pengelolaan Integrated Community Shelter (ICS) pasca bencana di kota Palu.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada masing-masing penelitian meneliti tentang Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Integrated Community Shelter Pasca Bencana Di Kota Palu, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu itu lebih fokus menjelaskan tentang ekonomi kreatif sedangkan penelitian saya

lebih fokus pada Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Kolaborasi Lintas Regional Bagi Pengungsi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa.

4. (F. Mahdia 2013) dalam penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Google Maps Api Untuk Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik Pasca Bencana Alam Berbasis Mobile Web” Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa Dari penelitian ini dihasilkan sebuah sistem informasi manajemen bantuan logistik pasca bencana alam berbasis mobile web yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan instansi yang akan memberikan bantuan mengenai jarak, rute jalan, penunjuk arah jalan dan daftar kebutuhan logistik posko bencana alam.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada masing-masing penelitian meneliti tentang Pemanfaatan Google Maps Api Untuk Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik Pasca Bencana Alam Berbasis Mobile Web, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu itu lebih fokus menjelaskan tentang ekonomi kreatif sedangkan penelitian saya lebih fokus pada Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Kolaborasi Lintas Regional Bagi Pengungsi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa.

B. Teori dan Konsep

1. Definisi Manajemen Logistik

Menurut James R. Stock dan Douglas (2001) Manajemen logistik adalah bagian dari proses rantai supply yang terencana, dapat diterapkan, dan efisiensi dalam pengontrolan, aliran yang efektif dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik-asal ke titik-konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan.

Lukas Dwiantara dan Rumsari Hadi (2004) mendefinisikan Manajemen logistik sebagai serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Listyorini (2014) dalam bukunya “Dinamika Pemasaran” mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Logistik merupakan serangkaian kegiatan mulai dari, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, pada kegiatan pengadaan, pencatatan, penyaluran, pemindahan,

penyimpatan sumberdaya guna mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.



2. Sistem Manajemen Logistik

Sistem adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menjalankan suatu kegiatan. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengelola suatu kegiatan yang biasanya dalam kegiatan tersebut digunakan pendekatan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Logistik adalah segala sesuatu yang berujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya.

Sistem Manajemen Logistik Bantuan Bencana Alam di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) mencakup kegiatan:

- a. Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan
 - b. Pengadaan dan/atau Penerimaan
 - c. Pergudangan dan/atau Penyimpanan
 - d. Pendistribusian
 - e. Pengangkutan
- ## 3. Faktor-faktor utama dalam pengendalian logistik bencana

Kemampuan organisasi yang bergerak dalam bidang kebencanaan dalam mengurangi pengaruh internal dan eksternal terhadap pelaksanaan manajemen logistik bencana akan berpengaruh kepada kurangnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Artinya, tingkat kesuksesan organisasi yang terlibat dalam pengaturan logistik bencana dapat diukur dari sejauh mana kemampuan organisasi dalam mengatur arus barang dan peralatan yang dibutuhkan korban.

Petit dan Beresford (2012) Menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian logistik bencana adalah adanya perencanaan strategis (*strategic planning*), manajemen persediaan (*inventory management*) yang baik, perencanaan transportasi (*transport planning*), perencanaan kapasitas (*capacity planning*), manajemen informasi (*information management*), manajemen sumber daya manusia (*human resource management*), perbaikan terus menerus (*continuous improvement*), kerjasama (*collaboration*), dan pemanfaatan teknologi (*technology utilization*).

Van Wassenhove (2006) Menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia, manajemen pengetahuan, operasional dan manajemen proses, sumber daya keuangan, dan komunitas adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengendalian logistik bencana.

Menurut Petit dan Beresford (2009) keputusan jangka panjang, perencanaan, manajemen persediaan, perencanaan transportasi, perencanaan kapasitas pergudangan, manajemen informasi, penerapan teknologi, dan perbaikan yang berkelanjutan serta adanya hubungan

dengan suplier (kolaborasi) adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi manajemen logistik bencana.

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan secara garis besar ada 6 (enam) faktor utama yang dapat mempengaruhi logistik bencana yakni; Sumber Daya Manusia (SDM), Infrsatraktur, sarana prasarana, pendanaan, kolaborasi dan kerja sama dan situasi ketidak pastian.

C. Pengelolaan Logistik Kemanusiaan

Logistik kemanusiaan dapat secara sederhana didefinisikan sebagai cabang logistik yang berurusan dengan aspek logistik dari sistem manajemen bencana, termasuk berbagai kegiatan seperti pengadaan, penyimpanan, dan pengangkutan makanan, air, obat-obatan, dan persediaan lainnya serta sumber daya manusia, mesin yang diperlukan dan peralatan, dan korban yang terluka sebelum dan sesudah bencana terjadi (Nikbakhsh & Farahani, 2011).

Menurut Peraturan BNPB RI No. 04 Tahun 2018, Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan logistik dan peralatan meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, inventarisasi ketersediaan, pengumpulan data, dan analisis untuk menghasilkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Pengadaan merupakan kegiatan pemenuhan atau penyediaan kebutuhan melalui perencanaan kebutuhan sampai dengan perolehan. Pergudangan merupakan pengelolaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan

pengeluaran logistik dan peralatan di gudang. Pendistribusian merupakan sistem penyaluran dan penyerahan Logistik dan Peralatan dari daerah asal ke daerah tujuan sampai pada sasaran yang dituju. Penghapusan barang milik negara dari daftar barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (BNPB, 2018).

1. Tepat Jenis

Merujuk pada Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008, jenis-jenis bantuan dalam penanggulangan bencana yaitu bantuan tempat penampungan/hunian sementara, bantuan pangan, bantuan non-pangan, bantuan sandang, bantuan air bersih dan sanitasi, serta bantuan pelayanan kesehatan.

Bantuan penampungan/hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus.

Bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk: Peralatan Memasak dan Makan; kompor, bahan bakar, dan

penerangan; serta alat-alat dan perkakas. Bantuan sandang diberikan dalam bentuk perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi. Bantuan air bersih dan sanitasi yang diberikan untuk korban bencana dapat berupa bantuan air bersih, bantuan air minum, dan bantuan sanitasi.

Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan. Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk: pelayanan kesehatan umum, pengendalian penyakit menular, dan pengendalian penyakit tidak menular. Oleh karena hal tersebut, tepat jenis dapat diartikan sebagai pengorganisasian jenis bantuan untuk korban terdampak bencana sesuai dengan kebutuhan, standar dan kebijakan yang ada (BNPB, 2008).

2. Tepat Jumlah

Sebelum pendistribusian bantuan dilakukan, pihak BNPB akan melakukan penilaian kebutuhan dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan akan dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan. Identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan diskusi dengan calon penerima bantuan. Keterlibatan korban dalam kegiatan ini dimaksudkan agar bantuan yang akan diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka.

Penghitungan jumlah bantuan keseluruhan, dilakukan dengan teknik pengolahan data sederhana (*manual*) atau jika data terlalu kompleks karena melibatkan jumlah dan jenis bantuan yang banyak, maka pengolahan data dapat menggunakan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) atau teknik pengolahan data lain yang paling memungkinkan. Jadi, tepat jumlah dapat didefinisikan sebagai pemberian kuantitas bantuan secara tepat kepada korban bencana.

3. Tepat Kualitas

Dalam pendistribusian bantuan kepada korban bencana, BNPB menetapkan standar minimal terhadap jenis bantuan yang dapat dikirimkan oleh donor melalui Peraturan Kepala BNPB No. 07 Tahun 2008. Melalui standar minimum ini, diharapkan pemberian bantuan memenuhi kualitas yang baik dan mencapai dengan ketentuan minimum yang ada.

4. Tepat Waktu

Peraturan Kepala BNPB No. 07 Tahun 2008 menjelaskan bahwa jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.

5. Tepat Sasaran

Dalam mendukung pendistribusian bantuan yang tepat sasaran, BNPB melakukan beberapa mekanisme untuk memenuhi prinsip tersebut yaitu:

- a. Penerima bantuan pangan diidentifikasi dan menjadi sasaran berdasarkan kebutuhan.

- b. Metode distribusi dirancang melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat, lembaga-lembaga mitra, dan melibatkan berbagai kelompok penerima.
 - c. Titik-titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima untuk memastikan akses yang mudah dan aman.
 - d. Kualitas, jumlah jatah makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan.
 - e. Kinerja dan efektifitas program bantuan pangan dimonitor dan dievaluasi dengan semestinya.
6. Tepat Biaya

Dengan mendistribusikan bantuan dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu secara tidak langsung akan mewujudkan prinsip tepat biaya. Efisiensi biaya akan terjadi dengan adanya minimasi bantuan yang terbuang akibat tidak memenuhi standar kualitas dan atau kelebihan jumlah bantuan. Bantuan yang tidak tepat jenis, jumlah dan kuantitas tidak hanya akan menimbulkan sampah tetapi juga akan memenuhi kapasitas pengiriman bantuan pada moda transportasi, yang pada akhirnya akan menimbulkan biaya transportasi tambahan.

7. Tepat Pelaporan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan ataupun

dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Pencatatan penerimaan bantuan meliputi: pemberi bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, serta waktu penyerahan bantuan.
- b. Pencatatan penyaluran meliputi: penerima bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, waktu penyaluran, lokasi penyaluran bantuan, serta penanggungjawab (*contact persons*).
- c. Pencatatan persediaan logistik dan peralatan.
- d. Pelaporan hasil penerimaan dan penyaluran bantuan disampaikan kepada Satlak PB/BPBD kabupaten/kota, Satkorlak PB/BPBD provinsi atau BNPB dengan tembusan lembaga/instansi yang memberi bantuan.

D. Konsep Kolaborasi

Secara etimologi, *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O'Leary, 2010), ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun. Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan

permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Bahkan secara lebih spesifik, kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Walaupun demikian, pengertian tersebut bukanlah merupakan pengertian tunggal dari konsep kolaborasi. Identik dengan ilmu-ilmu sosial pada umumnya kolaborasi sebagai salah satu konsep disiplin ilmu sosial memiliki pengertian yang kompleks tergantung dari sudut pandang para ahli itu memahaminya.

Bertolak dari pendapat Lai ataupun Camarinha-Mathos dan Afsarmanesh tersebut mengandung makna bahwa implikasi yang ditimbulkan dari adanya kolaborasi itu adalah munculnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan, berbagai risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan balas jasa yang diharapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Betapa kebersamaan tersebut dapat menimbulkan kesan atau identitas adanya kerja sama dan kebersamaan antarpihak yang berserikat. Lebih dari itu, kolaborasi juga meliputi adanya keterlibatan dan proses pelibatan bersama bagi semua partisipan untuk menanggulangi masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, konsep kolaborasi itu juga berimplikasi terhadap terciptanya sikap saling percaya satu sama lain dalam segala situasi, waktu, kesempatan, serta upaya dan dedikasinya. Berangkat dari uraian tentang kolaborasi tersebut sejalan dengan pandangan yang diutarakan oleh Wanna (2008, hlm. 3) yang secara sederhana mengatakan bahwa *collaboration means joint working or working in conjunction with others; it implies actors—individuals, groups or organisations—cooperating in some endeavour.*

Sementara itu, definisi kolaborasi yang unsur-unsurnya lebih perinci dan lengkap pernah diutarakan Sanaghan (2015) sebagai berikut.

“Collaboration involves a transparent and trusted communication process where all parties feel informed and can provide feedback and ideas to others with whom they work. Most importantly, collaboration involves shared decision making, where the decision rules are understood by everyone and all involved parties can inform or influence important decisions that can potentially impact them, especially resource allocation decisions”.

Betapa definisi yang diutarakan oleh Sanaghan ini dianggap memiliki unsur yang lebih lengkap. Disamping memuat unsur-unsur yang sama dengan definisi yang disusun oleh para ahli yang telah disebutkan, definisi yang disusun oleh Sanaghan telah memasukkan unsur decision rules dan decision making, terutama yang terkait dengan keputusan atas alokasi sumber daya khusus yang dibutuhkan dalam proses kolaborasi yang dimaksud.

1. Kolaborasi Lintas Regional

Kolaborasi lintas regional dalam pengelolaan logistik kemanusiaan merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi respon terhadap bencana alam di wilayah yang terdampak. Teori ini melibatkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kemanusiaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, di lintas wilayah atau provinsi untuk memastikan bahwa bantuan dan logistik yang dibutuhkan dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik.

2. Pentingnya Kolaborasi

Sadarkah kita bahwa salah satu faktor yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyukseskan berbagai kegiatan ‘bisnis’ ataupun kegiatan di bidang ‘pemerintahan’ itu terletak pada kerelaan para pegawai dalam mengerjakan tugas pekerjaan mereka secara teamwork atau adanya aktivitas kerja yang dilakukan secara kolaboratif. Betapa penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara berkolaboratif akan dapat menciptakan penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, lebih efektif, serta lebih efisien dibandingkan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara sendirian. Bahkan kolaborasi dapat menciptakan para pegawai menjadi lebih bertanggung jawab, sehingga lambat laun akan dapat meningkatkan derajat motivasi mereka, terutama ketika mereka bekerja secara teamwork. Terlebih lagi apabila mereka dihadapkan pada sebuah tantangan yang datang dari luar organisasi. Situasi yang demikian ini akan dapat meningkatkan kreativitas kerja mereka secara tajam yang bertujuan untuk meningkatkan semangat berkolaborasi yang semakin kuat dan sehat.

Lebih dari itu, pembentukan kolaborasi dapat digunakan untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Bahkan, dalam proses pencapaian tujuan tersebut, tidak dianjurkan melakukan pengotakngotakan atas tugas-tugas yang diemban oleh masing-masing pihak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi (1984) bahwa kolaborasi merupakan upaya sadar dalam mencapai tujuan bersama yang telah mereka tetapkan melalui pembagian

tugas/pekerjaan. Pembagian kerja tersebut bukanlah sebagai bentuk pengotak-ngotakan kerja, tetapi masih harus dinilai sebagai satu kesatuan kerja yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan bersama. Sementara itu pada sisi yang lain, pembentukan kolaborasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang besar, beban pendanaan yang besar, penyediaan aset kerja, ataupun untuk penanggulangan berbagai permasalahan yang berat dan rumit yang tidak mungkin dapat dikerjakan secara individual tanpa ada partisipasi dan campur tangan dari pihak lain.

Secara lebih terperinci, Valdellon (2017) mengatakan bahwa pembentukan kolaborasi itu, baik yang dilakukan antarindividu maupun antarlembaga/organisasi sangat penting karena kolaborasi memiliki sebelas (11) manfaat yang meliputi hal berikut.

- a. Kolaborasi dapat meningkatkan *fleksibilitas* organisasi (*improved flexibility of the organization*).

Secara faktual, telah diakui bahwa pola kerja tim atau kolaborasi itu merupakan fondasi dasar dari metode pelaksanaan kerja. Apabila kolaborasi dapat dilaksanakan dengan baik, kemampuan seseorang atau organisasi itu akan menjadi semakin kuat dalam menangani perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Betapa pola kerja tim itu mampu membuat penyelesaian pekerjaan itu menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Di samping itu, penyelesaian pekerjaan yang dilakukan

secara kolaboratif dianggap merupakan tindakan cerdas dan lebih fleksibel.

- b. Kolaborasi dapat digunakan untuk saling mempertautkan para pekerja (*engaged employees*).

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Valdellon bahwa pekerja di Amerika Serikat itu hanya 33% yang saling bertautan (bekerja sama satu sama lain). Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi organisasi. Apabila seorang pimpinan atau manajer itu tidak mampu menjalin hubungan yang baik bagi para pekerjanya untuk bekerja secara teamwork atau kolaboratif, ia bukanlah seorang pimpinan yang efektif. Cara yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan di dalam sebuah organisasi itu harus ditempuh melalui pelibatan mereka di dalam sebuah tim kerja.

- c. Kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk memperlakukan karyawan atau pegawai secara yang sehat (*healthier employees*).

Kolaborasi merupakan strategi pembentukan tim kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi 'kesehatan kerja' pegawai atau karyawan. Bagaimana mungkin tim kerja yang itu dapat meningkatkan kesehatan kerja bagi pegawai apabila mereka tidak diperlakukan secara baik oleh sebuah organisasi? Menurut pandangan dari Harvard Bussines Review, apabila Anda benar-benar menginginkan terjadinya pola kerja pegawai yang berkualitas dan penuh tanggung jawab,

ciptakanlah ‘nilai-nilai budaya kerja’ ideal yang dapat mereka jadikan sebagai way of life dalam melakukan pola kerja yang kolaboratif.

- d. Kolaborasi dapat digunakan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang produktif (*more productive meeting*).

Kolaborasi yang efektif merupakan hasil dari adanya rapat koordinasi yang efisien. Itu artinya selenggarakanlah rapat kerja sejarang mungkin, tetapi membahas dan membuat keputusan tentang banyak hal selengkap dan sejelas mungkin. Budaya kerja yang proaktif dapat memperkaya budaya korporasi. Para pegawai atau karyawan hanya membutuhkan rapat kerja, ketika diperlukan untuk dimanfaatkan sebagai tool of coordination dan digunakan sebagai tools to documentation atas kemajuan kerja yang telah dilaksanakan atau digunakan untuk pendelegasian sebuah tugas pekerjaan. Lebih dari itu, apabila rapat kerja itu memang harus dilakukan, rapat tersebut harus mendapatkan sharing informasi yang proaktif agar dapat digunakan untuk melakukan kesepakatan kerja dan digunakan sebagai sarana untuk saling memberikan dukungan atas berbagai upaya yang dilakukan oleh masing-masing anggota.

- e. Kolaborasi semakin memperkuat terciptanya talenta yang tinggi (*more attractive to top talent*).

Melalui kolaborasi, dapat diciptakan seseorang atau sebuah organisasi yang memiliki daya saing tinggi ketika di dalam organisasi itu terdapat orang-orang yang bertalenta tinggi. Berikanlah motivasi

yang dapat menciptakan terwujudnya job prospect yang mereka inginkan dan yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan kemampuan bagi semua orang sehingga mereka dapat saling menghormati siapa saja yang berkolaborasi serta respek terhadap setiap orang yang mereka anggap berjasa dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang penyelesaian atas sebuah pekerjaan.

- f. Kolaborasi dapat digunakan untuk memacu terhadap kemajuan bisnis yang lebih cepat (*accelerated business velocity*).

Dalam kehidupan bisnis, budaya kolaboratif sangat bermanfaat bagi mereka dalam peningkatan kemampuan organisasi dalam memproduksi dan mempercepat pemasaran. Betapa kecepatan atas communication sharing dalam sebuah tim kerja yang kolaboratif sepenuhnya dapat menciptakan proses kerja yang cepat serta dapat mempermudah untuk memproduksi sesuatu. Bahkan, dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan produk-produk baru.

- g. Kolaborasi dapat meningkatkan daya simpan atau daya ingat yang lebih tinggi (*higher retention rates*).

Manfaat apakah yang lebih berguna daripada pelibatan pegawai atau karyawan secara lebih baik dalam proses pelaksanaan pekerjaan? Tiada lain dan tiada bukan adalah menciptakan perasaan bahagia, bangga, dan terhormat atas pelibatan mereka. Kondisi atau perlakuan yang semacam itulah yang selalu mereka ingat, sehingga mereka

memiliki alasan yang kuat untuk selalu mendukung, loyal, dan setia terhadap organisasi yang berakibat seriusnya mereka dalam mengemban tugas-tugas pekerjaannya. Artinya, jika orang-orang yang bekerja sama dengan mereka, mereka diperlakukan secara baik, bersikap sangat familier, bermurah hati, dan penuh hormat serta saling menghargai atas jerih payah masing-masing orang. Mereka akan membangun kekompakan kerja yang berdampak positif bagi semua pihak. Walaupun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kolaborasi selalu menghasilkan situasi tersebut. Kolaborasi yang sehat dan memiliki fondasi kolaborasi yang kuat sajalah yang dapat menghasilkan kondisi tersebut.

- h. Kolaborasi dapat menciptakan ide-ide kreatif yang inovatif (*innovative ideas*).

Sungguh bahwa hidup berkolaborasi itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam hal tertentu, bisa saja kolaborasi itu membangkitkan friksifriksi negatif apabila tidak dikelola dengan baik dan benar sehingga kolaborasi yang ada justru tidak menghasilkan apa pun yang berguna, tetapi menciptakan situasi yang sebaliknya. Namun, apabila berbagai friksi yang muncul dalam kehidupan kolaboratif itu bisa dikelola secara benar, berbagai friksi ataupun konflik yang terjadi antarpersonal dalam berkolaborasi itu bisa digunakan untuk membangkitkan dinamika yang positif dan dapat memunculkan ide-ide yang inovatif. Oleh sebab itulah, apabila terjadi konflik dan friksi

dalam kehidupan kolaboratif, hal itu bisa dikelola dengan menggunakan metode manajemen konflik yang tepat yang akan dapat melahirkan ide-ide inovatif yang bermanfaat bagi organisasi ataupun bagi orang-orang yang berada dalam organisasi.

- i. Kolaborasi dapat digunakan untuk menempatkan posisi *stakeholder* secara lebih tepat (*better alignment with stakeholders*).

Apabila kita membahas kolaborasi, hal itu akan lebih bagus lagi jika ide tersebut digunakan secara lebih spesifik, yakni membangun kolaborasi dengan pihak eksternal, baik itu dengan pihak customers, partners (mitra kerja), vendors, suppliers, stakeholders, ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan proyek yang sedang Anda kerjakan ataupun yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan.

- j. Kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi segenap individu yang terlibat (*enhanced individual productivity*).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company, pelaksanaan proses kolaborasi yang digunakan sebagai sarana untuk membentuk jaringan kerja ternyata dapat meningkatkan produktivitas kerja para personel antara 20% sampai dengan 30%. Lebih dari itu, ketika beberapa teamwork menggunakan alat komunikasi secara efisien dalam proses kerjanya, hal tersebut dapat meningkatkan kinerja para anggota tim untuk mencapai hasil yang lebih cepat dan lebih berkualitas.

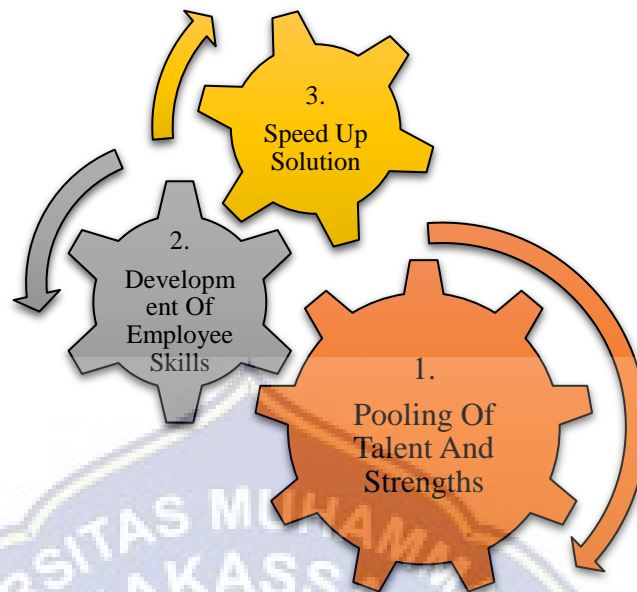
- k. Kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan (*increased profitability*).

Pada akhirnya, tentu saja kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan bagi semua pihak yang berkolaborasi. Mengapa demikian? Pada umumnya, kolaborasi itu dibangun berdasarkan hasil rekrutmen atas orang-orang yang kredibel atau atas pihak-pihak yang memiliki keunggulan spesifik di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, berbagai keunggulan tersebut sangat berguna bagi kehidupan berkolaborasi. Mereka pada umumnya memiliki ide-ide yang bagus serta inovatif yang dapat mendorong terciptanya keahlian baru, kemampuan baru, dan metode-metode kerja baru dan produk baru yang sangat bermanfaat bagi kemajuan organisasi

3. Manfaat Berkolaborasi

Selain kolaborasi itu sebagai aspek penting untuk dilakukan oleh para kolaborator, kolaborasi juga memiliki beberapa keuntungan atau manfaat bagi para kolaborator dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara kolaboratif dalam sebuah organisasi. Beberapa keuntungan atau manfaat yang dimaksud posisinya bertautan dan saling memengaruhi satu dengan lainnya yang dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Gambar 2.2 Manfaat Kolaborasi



E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritik merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. kerangka berpikir mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka kerja adalah representasi konseptual tentang bagaimana sebuah teori terhubung dengan elemen lain yang telah diakui sebagai kesulitan yang signifikan. Kerangka kerja yang kuat secara konseptual akan menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. tinjauan pustaka menyajikan suatu dasar untuk membentuk kerangka teoritik atau kerangka pikir peneliti, sedangkan kerangka teoritik menjadi dasar untuk membuat hipotesis. kerangka teoritik menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan tersebut serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan-hubungan yang terjadi. kerangka teoritik yang baik

mengidentifikasi serta menentukan variabel-variabel yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan.





Tabel 2.3 Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Dalam hal ini peneliti ini ingin mengetahui bagaimana elemen sukses Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Bagi Pengungsi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi penelitian ini yaitu:



1. Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan

Pada tahap ini, BPBD harus merencanakan dan mengidentifikasi kebutuhan bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi atau korban bencana alam. Hal ini melibatkan penilaian terhadap jenis, jumlah, dan sifat barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban.

2. Pengadaan dan Penerimaan

Setelah kebutuhan teridentifikasi, BPBD harus melakukan pengadaan atau penerimaan barang bantuan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Hal ini bisa melibatkan pembelian barang, penerimaan donasi, atau koordinasi dengan lembaga lain yang memberikan bantuan.

3. Pergudangan dan Penyimpanan

Barang bantuan yang telah diterima perlu disimpan dengan baik dan aman. Pergudangan atau penyimpanan yang efisien penting untuk mencegah kerusakan atau kehilangan barang, serta memastikan ketersediaan barang saat diperlukan.

4. Pendistribusian

Pendistribusian adalah proses mengalokasikan dan mengirimkan barang bantuan dari tempat penyimpanan ke lokasi-lokasi yang membutuhkan. Distribusi harus dilakukan dengan efektif dan efisien agar bantuan tepat waktu mencapai penerima.

5. Pengangkutan

Pengangkutan melibatkan proses fisik menggerakkan barang bantuan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pengangkutan bisa melibatkan berbagai

moda, seperti kendaraan darat, laut, udara, atau bahkan pengangkutan manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu dalam penelitian. Adapun waktu penelitian yang akan ditempuh yaitu 2 bulan mulai 22 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar tepat di Jl Kerung kerung, Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa tepat di Syech Yusuf Discovery, Jl. Lap. Syekh Yusuf Discovery, Kalegowa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan alasan penelitian karena ingin mengetahui Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif sedangkan tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan acuan pada pengukuran indeks terhadap kolaborasi pengelolaan logistik kemanusiaan. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif yakni untuk memberikan gambaran berdasarkan fenomena dan kenyataan yang terjadi, menganalisis, mengobservasi serta mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Logistik

Kemanusiaan Bagi Pengungsi Bencana Alam di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data yang dianggap primer berasal dari sumber asli atau utama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Informasi ini harus diperoleh melalui sumber, juga dikenal sebagai responden, yaitu individu yang kami libatkan untuk tujuan penelitian atau sebagai cara mengumpulkan data.

2. Data Sekunder

Data yang tidak segera memasok data ke pengumpul data disebut sebagai data sekunder. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data utama, yang meliputi buku-buku dan bacaan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian.

D. Informasi Penelitian

Informan penelitian ini ditentukan secara purposive sampling yaitu dipilih secara sengaja yang dianggap memahami dan mengetahui data, informasi dan fakta untuk dilakukan wawancara, baik dari pihak Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun dari Masyarakat sesuai dengan lokasi penelitian.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Muhammad Ilham Idris, S. E	MII	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik (BPBD) Kota Makassar
2	Ahmad Ismunandar, S.Stp., M.Si	AI	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kota Makassar
3.	Salahuddin, S.Stp	SH	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik (BPBD) KAbupaten Gowa
4.	Syofyar Majid, Sh	SM	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kabupaten Gowa
5.	Gunawan	GN	Korban terkena Bencana Alam

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang detail dapat dikumpulkan dalam waktu yang relatif lama berkat metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Karena memperoleh data adalah tujuan utama dari penelitian, prosedur pengumpulan data adalah tahapan yang paling penting dalam proses. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Menggunakan informan penelitian yang dipilih sebagai sampel dan diyakini mampu memberikan informasi, pendekatan ini dilakukan melalui pertemuan langsung untuk bertukar informasi atau gagasan melalui sesi tanya jawab secara lisan dan mendalam yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dan sebagai bentuk lampiran proses pengambilan data maupun untuk menginput data.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap data verbal yang terkumpul di lapangan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data sesuai dengan langkah-langkah prosedur berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih data mana yang akan diperhatikan dan dipusatkan baik pada data yang sekedar pelengkap maupun data yang benar-benar dibutuhkan sebagai data primer. Dalam uraian atau laporan yang menyeluruh dan mendalam, disajikan data-data yang dikumpulkan dari lokasi studi atau data lapangan. Laporan lapangan diringkas, diringkas, dan poin utamanya dipilih dan dikonsentrasikan.

2. Penyajian Data

Semua masalah kajian disajikan dengan data yang telah dikumpulkan dari lapangan, dipilah antara yang perlu dan yang tidak, kemudian dikategorikan, dan terakhir diberi batasan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Data kemudian dapat disajikan, dan kesimpulan awal dapat dibuat. Sepanjang penyelidikan, kesimpulan ini juga tercapai. Para peneliti telah berusaha untuk memeriksa dan memperoleh signifikansi dari apa yang telah ditentukan sejak awal lapangan serta selama proses pengumpulan data.

G. Keabsahan Data

Pada titik ini, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi, yang digambarkan sebagai memverifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai periode untuk menilai kepercayaannya. Macam Macam teknik triangulasi, menurut Sugiyono (sinatriyo:2019) dalam (Fitriani, 2013):

1. Triangulasi Sumber Data

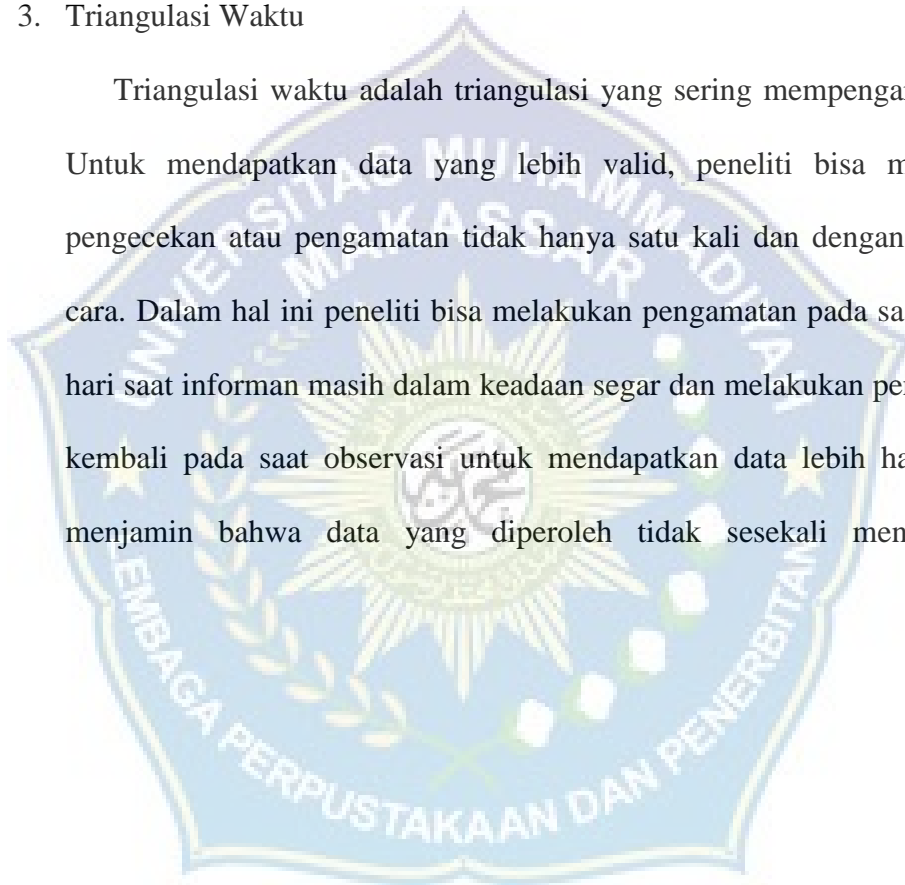
Triangulasi sumber adalah jenis triangulasi yang memverifikasi data yang telah dikumpulkan dari banyak sumber untuk memverifikasinya. Dalam situasi ini, peneliti dapat membandingkan temuan observasi dan wawancara dengan dokumen yang sudah ada atau temuan wawancara informan (data primer) dengan membaca literatur terkait penelitian (data sekunder).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, metode observasi atau dokumentasi digunakan untuk memverifikasi data yang diterima dengan metodologi wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Untuk mendapatkan data yang lebih valid, peneliti bisa melakukan pengecekan atau pengamatan tidak hanya satu kali dan dengan berbagai cara. Dalam hal ini peneliti bisa melakukan pengamatan pada saat di pagi hari saat informan masih dalam keadaan segar dan melakukan pengamatan kembali pada saat observasi untuk mendapatkan data lebih handal dan menjamin bahwa data yang diperoleh tidak sesekali menyimpang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan pengumpulan data, disediakan deskripsi temuan-temuan penelitian dan pembahasan data-data yang berkaitan dengan topik kajian. Peneliti terlebih dahulu akan memberikan pengenalan umum secara singkat tentang Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelum menguraikan temuan penelitian dan kesimpulan dari pembahasan.

1. Profil Umum Kota Makassar

Kota Makassar (Makassar: kadang dieja Macassar, Mangkasar; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujungpandang atau Ujung Pandang) adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya ini adalah kota terbesar pada $5^{\circ}8'S$ $119^{\circ}25'E$ Koordinat: $5^{\circ}8'S$ $119^{\circ}25'E$, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar.

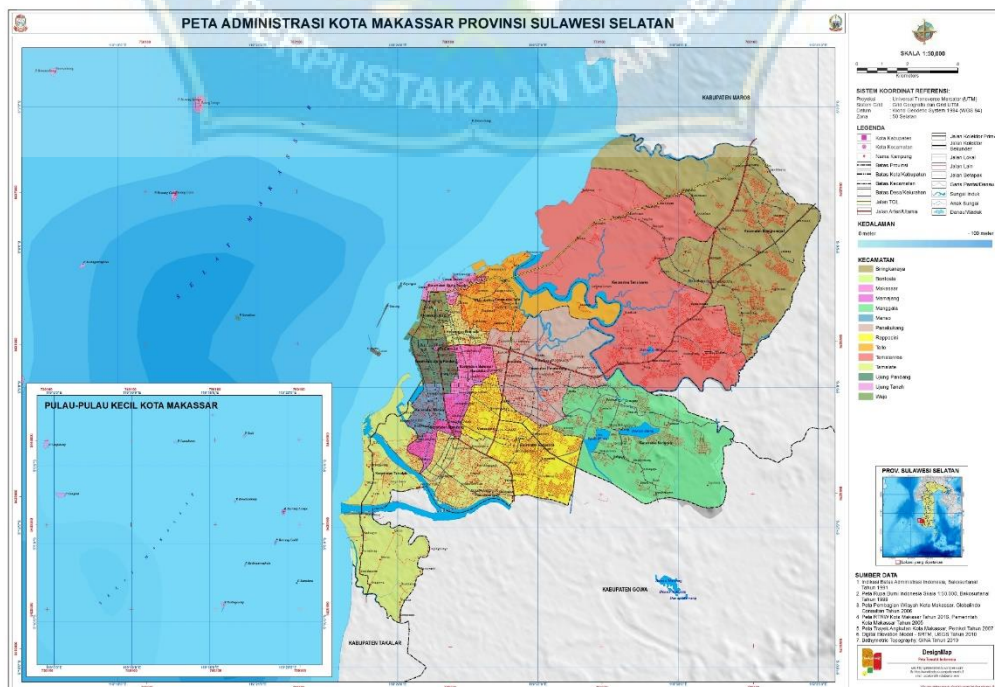
Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang

baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

a Kondisi Geografis

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari lakilaki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.

Luas wilayah kecamatan :1 Tamalanrea : 31,84 km²; 2 Biringkanaya 48,22 km²; 3 Manggala 24,14 km²; 4 Panakkukang 17,05 km²; 5 Tallo 5,83 km²; 6 Ujung Tanah 5,94 km²; 7 Bontoala 2,10 km²; 8 Wajo 1,99 km²; 9 Ujung Pandang 2,63 km²; 10 Makassar 2,52 km²; 11 Rappocini 9,23 km²; 12 Tamalate 20,21 km²; 13 Mamajang 2,25 km²; 14 Mariso 1,82 km².



Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar

Tabel 4.2: luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2024.

NO	Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Desa/Kelurahan
1	73.71.11	Biringkanaya	11	Bakung. Berua. Bulurokeng. Daya. Katimbang. Laikang. Paccerakkang. Pai. Sudiang. Sudiang Raya. Untia.
2	73.71.06	Bontoala	12	Baraya. Bontoala. Bontoala Parang. Bontoala Tua. Bunga Ejaya. Gaddong. Layang. Malimongan Baru. Parang Layang. Timungan Lompoa. Tompo Balang. Wajo Baru.
3	73.71.15	Kepulauan Sangkarrang	3	Barrang Caddi. Barrang Lompo. Kodingareng.
4	73.71.03	Makassar	14	Bara Baraya. Bara Baraya Selatan. Bara Baraya Timur. Bara Baraya Utara. Barana. Lariang Bangi. Maccini. Maccini Gusung. Maccini Parang. Maradekaya. Maradekaya Selatan. Maradekaya Utara. Maricaya. Maricaya Baru.
5	73.71.02	Mamajang	13	Baji Mappakasunggu. Bonto Biraeng. Bonto Lebang. Karang Anyar. Labuang Baji. Mamajang Dalam. Mamajang Luar. Mandala. Maricaya Selatan. Pa'batang. Parang. Sambung Jawa. Tamparang Keke.
6	73.71.12	Manggala	8	Antang. Bangkala. Batua. Biring Romang. Bitowa. Borong. Manggala. Tamangapa.
7	73.71.01	Mariso	9	Bontorannu. Kampung Buyang. Kunjung Mae. Lette. Mario. Mariso. Mattoanngin. Panabungan. Tamarunang.
8	73.71.09	Panakkukang	11	Karampuang. Masale. Pampang. Panaikang. Pandang. Sinrijala. Tamamaung. Karuwisi. Karuwisi Utara. Paropo. Tello baru.
9	73.71.13	Rappocini	11	Balla Parang. Banta Bantaeng.

				Bonto Makkio. Bua Kana. Gunung Sari. Karunrung. Kassi Kassi. Mapala. Minasa Upa. Rappocini. Tidung.
10	73.71.07	Tallo	15	Buloa. Bunga Eja Bru. Kalukuang. Kaluku Bodoa. La'Latang. Lakkang. Lembo. Pannampu. Rappojawa. Rappokalling. Suangga. Tallo. Tammua. Ujung Pandang Baru. Wala Walaya.
11	73.71.14	Tamalanrea	8	Bira. Buntusu. Kapasa. Kapasa Raya. Parang Loe. Tamalanrea. Tamalanrea Indah. Tamalanrea Jaya.
12	73.06.10	Tamalate	11	Balang Baru. Barombong. Bongaya. Bonto Duri. Jongaya. Maccini Sombala. Mangasa. Mannuruki. Pa'baeng Baeng. Parang Tambung. Tanjung Merdeka.
13	73.71.04	Ujung Pandang	10	Baru. Bulogading. Lae Lae. Lajangiru. Losari. Maluku. Mangkuru. Pisang Selatan. Pisang Utara. Sawerigading.
14	73.71.08	Ujung Tanah	9	Camba Barua. Cambaya. Gusung. Patingalloang. Patingalloang Baru. Tabaringan. Tamalabba. Totaka. Ujung Tanah.
15	73.71.05	Wajo	8	Butung. Ende. Malimongan. Malimongan Tua. Mampu. Melayu. Melayu Baru. Pattunuang.
Total			153	

Sumber: Website Kota Makassar 2024.

b Keadaan Penduduk Kota Makassar

Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Berdasarkan hasil analisa kami, jumlah populasi penduduk Kota Makassar 2023 diproyeksikan sebanyak 1.432.200 jiwa.

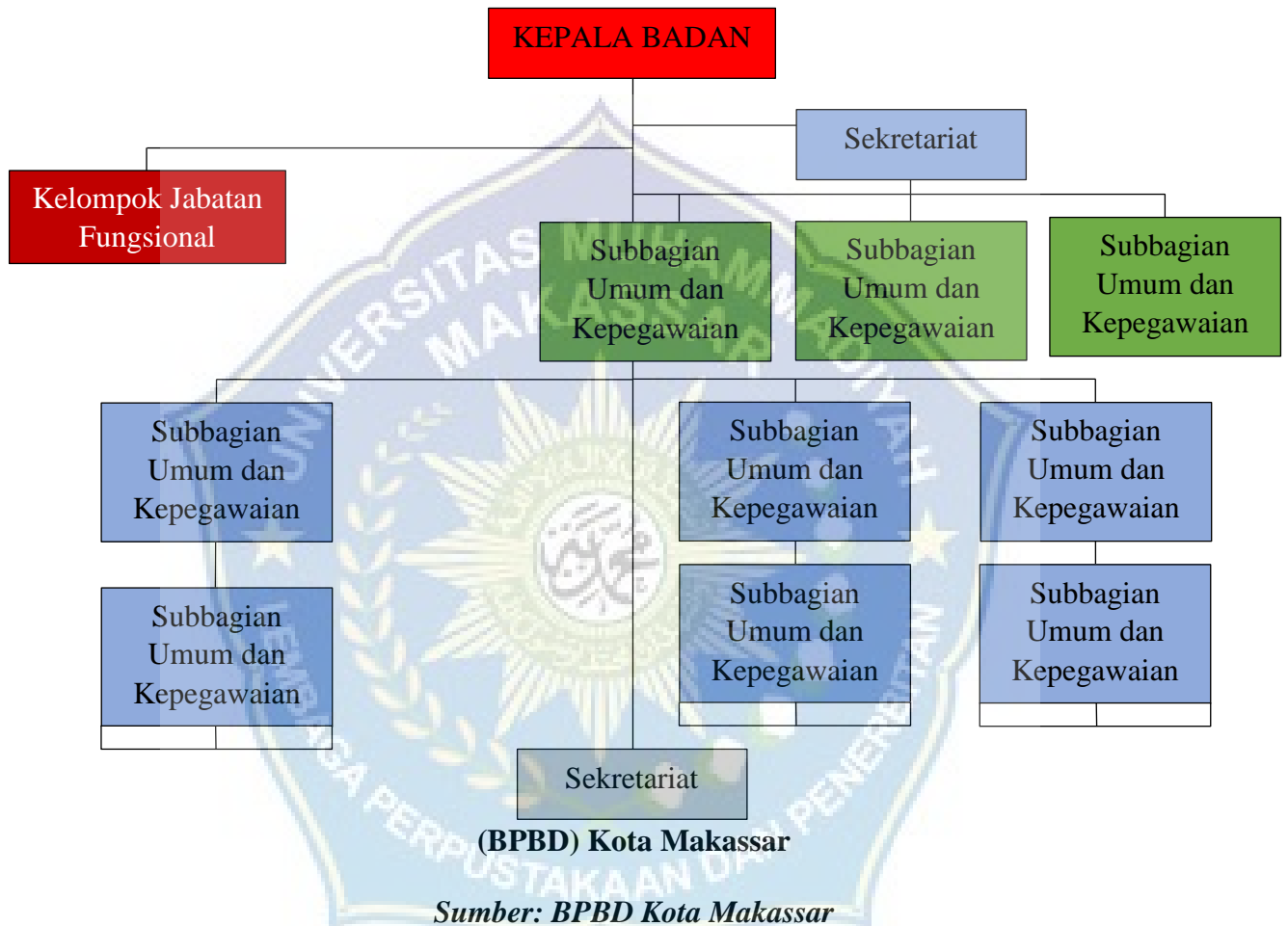
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Makassar								
	Laki Laki			Perempuan			Jumlah		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Mariso	28 903	29 007	29 246	28 691	28 788	29 484	57 594	57 795	58 730
Mamajang	27 520	27 542	28 632	28 536	28 552	29 661	56 056	56 094	58 293
Tamalate	90 757	91 174	94 013	90 776	91 174	94 419	181 533	182 348	188 432
Rappocini	70 802	70 865	73 548	73 817	73 868	77 065	144 619	144 733	150 613
Makassar	40 699	40 763	40 771	41 443	41 502	41 466	82 142	82 265	82 237
Ujung Pandang	11 895	11 903	12 058	12 631	12 638	12 793	24 526	24 541	24 851
Wajo	15 002	15 042	14 512	15 031	15 068	14 991	30 033	30 110	29 503
Bontoala	27 339	27 410	27 409	27 763	27 829	27 792	55 102	55 239	55 201
Ujung Tanah	17 995	18 087	18 401	17 952	18 040	18 344	35 947	36 127	36 745
Kepulauan Sangkarrang	7 051	7 087	7 486	7 136	7 171	7 495	14 187	14 258	14 981
Tallo	73 289	73 552	74 581	72 111	72 356	73 474	145 400	145 908	148 055
Panakkukang	69 693	69 762	71 640	69 942	69 997	72 564	139 635	139 759	144 204
Manggala	73 649	74 113	79 753	73 900	74 349	80 713	147 549	148 462	160 466
Biringkanaya	104 997	105 584	107 463	105 079	105 644	108 357	210 076	211 228	215 820
Tamalanrea	51 415	51 471	52 878	51 805	51 851	53 384	103 220	103 322	106 262
Jumlah	711 006	713 362	732 391	716 613	718 827	742 002	1 427 619	1 432 189	1 474 393

Sumber: Badan Statistik Kota Makassar 2024.

- c Struktur Organisasi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar

Tabel 4.4 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Tabel 4.5 Nama dan Jabatan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. A. HENDRA HAKAMUDDIN, S.STP, MPA	KEPALA PELAKSANA
2	MAHARUDDIN, S.Sos	SEKRETARIS DINAS
3	ASHARI PARAWANSA, S.E, M.Si	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

4	MUHAMMAD ASHAR AKBAR, S.E	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
5	NURHAENI, S.E, M.M	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
6	AHMAD ISMUNANDAR, S.STP., M.Si	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
7	MUHAMMAD ILHAM IDRIS, S.E	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
8	MUHAMMAD AFIF AZDY, S.IP., M.M	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
9	Drs. H. HAMSIN TASA, M.H	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA ANALIS MITIGASI BENCANA
10	MEIDY YANTO, S.E, M.A.P	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
11	H. ANSYAR KACI, S.H	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

Sumber: BPBD Kota Makassar

No.	NAMA JABATAN (PermenPANRB 41/2018)	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2		4	5
	XXXI. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		-	
2928	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	0	8	0
2929	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	0	9	4
2930	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	0	11	0
2931	JF Penata Analis Kebencanaan Ahli Pertama	0	8	0
2932	JF Penata Analis Kebencanaan Ahli Muda	0	9	0
2933	JF Penata Analis Kebencanaan Ahli Madya	0	11	0
2934	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Subbagian Umum dan Kepegawaian	7	0
2935	Analisis Barang Milik Negara	Subbagian Umum dan Kepegawaian	7	1
2936	Pranata Barang dan Jasa	Subbagian Umum dan Kepegawaian	6	0
2937	Pengelola Kepegawaian	Subbagian Umum dan Kepegawaian	6	0
2938	Pengadministrasi Umum	Subbagian Umum dan Kepegawaian	5	1
2939	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Subbagian Program	7	1
2940	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	Subbagian Program	6	0
2941	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Subbagian Program	5	0
2942	Bendahara	Subbagian Keuangan	7	1
2943	Penata Laporan Keuangan	Subbagian Keuangan	7	0
2944	Pengelola Gaji	Subbagian Keuangan	6	0
2945	Pengadministrasi Keuangan	Subbagian Keuangan	5	0
	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0		
2946	Analisis Mitigasi Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	7	0
2947	Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6	0
2948	Penyuluh Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	7	0
2949	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6	0
2950	Pengadministrasi Umum	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5	0
	Bidang Kedaruratan dan Logistik	0		
2951	Analisis Penanggulangan Krisis	Bidang Kedaruratan dan Logistik	7	0
2952	Pranata Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	6	0
2953	Pranata Perlindungan Masyarakat	Bidang Kedaruratan dan Logistik	5	0
2954	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis	Bidang Kedaruratan dan Logistik	7	0
2955	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	Bidang Kedaruratan dan Logistik	6	0
2956	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	5	0
	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0		
2957	Konselor	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7	0
2958	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	6	0
2959	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5	0
2960	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7	0
2961	Pengelola Program dan Kegiatan	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	6	0
2962	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5	0

Sumber: BPBD Kota Makassar

d Visi dan Misi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota Makassar

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Pemerintah Kota Makassar Visi pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

1) Visi

Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana

2) Misi

- a) Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional.
 - b) Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien.
 - c) Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana.
 - d) Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
 - e) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.
- e Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang selanjutnya disebut Renja OPD, merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1

(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah.

Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan tujuan sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, dan lokasi kegiatan sesuai dengan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Selanjutnya Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 secara umum dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam

menyelenggarakan pemerintahan dibidang kebencanaan yang lebih baik untuk periode RKPD Tahun 2024, sesuai visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara khusus, penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah untuk mengetahui:

- 1) Evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya;
- 2) Tujuan dan sasaran;
- 3) Indikator kinerja dan kelompok sasaran;
- 4) Indikasi program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah:

- 1) Mengevaluasi renja tahun sebelumnya;
- 2) Merencanakan program dan kegiatan;
- 3) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 4) Mengetahui pagu indikatif program dan kegiatan.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai 24 (dua puluh empat) Wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten

Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 46.717 Km² merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks karena terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terdapat 2 program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan sedangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terdapat 2 program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda dalam Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2024.

★ Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Tanggap Darurat Bencana Yang Tertangani (Prioritas)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Persentase Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Sah/Legal yang Tersedia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)	Target Program dan	Perkiraan realisasi Capaian Target renstra Perangkat
---------------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	---	--------------------	--

Daerah dan Pogram/Kegiatan	(Outcome)/Kegiatan (Output)	n Progra m (Renstra Perang kat Daerah) Tahun 2018-2023	Kinerja Hasil Progra m dan Keluar an Kegiat an s/d Tahun (2021)	Kegiatan Renja			Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perang kat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Pelayanan informasi rawan bencana provinsi	Persentase Cakupan Ketersediaan Sistem Peringatan Dini Bencana	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	200,0
Penyusunan kajian risiko bencana provinsi	Jumlah dokumen kajian rasio bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	1	0	1	1	100,0	0	0	0,0
Sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi KIE rawan bencana provinsi per jenis bencana	Jumlah aparatur pemerintah kabupaten/kota dan instansi lintas sektor yang mendapatkan informasi dan edukasi daerah rawan bencana	600	200	160	160	100,0	200	200	600,0
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan kebencanaan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang telah di susun danditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	1	1	0	0	0,0	0	0	0,0
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah aparatur yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	600	100	75	75	100,0	200	200	600,0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Pogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Progra	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)	Target Program dan Kegiatan Renja	Perkiraan realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
--	---	-------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------------	--

atan		m (Renstr a Perang kat Daerah) Tahun 2018- 2023	Progra m dan Keluara n Kegiat an s/d Tahun (2021)	Target Renja Perang kat Daerah Tahun (2022)	Realisa si Renja Perang kat Daerah Tahun 2022	Tingka t Realisa si %	Perang kat Daerah Tahun 2023	Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingka t Capaian n Realisa si Target Renstr a (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6 +8)	10=(9/ 3)
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	10	6	8	8	100,0	10	10	10,0
Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana	600	200	300	300	100,0	200	200	600,0
Penyusunan rencana kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi	2	0	1	1	100,0	1	1	2,0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang kat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian Target renstra Perang kat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perang kat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2022	Tingka t Realisa si %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingka t Capaian n Realisa si Target Renstr a (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6 +8)	10=(9/ 3)
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat Bencana	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah aparatur yang merespon cepat penanganan	600	200	200	200	100,0	200	200	600,0

	darurat bencana								
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	Jumlah logistik penanggulangan bencana yang tersedia dan tersalurkan	27500	8700	9000	9000	100,0	9500	9500	27500
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaan data bencana kabupaten/kota	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	200,0	100,0
Penanganan Pasca bencana Provinsi	Jumlah dokumen (JITU PASNA) dan (R3P) yang disusun	5	5	5	5	100,0	5	5	5,0
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah aparatur yang terlibat dalam Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	300	200	200	200	100,0	100	100	300,0
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	1	0	1	1	100,0	1	1	1,0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi

Selatan

Data dari Pusdalops BNPB menyebutkan wilayah terdampak berada di tujuh Kecamatan, terdiri dari Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, Tamalate, Pannakukang, Sangkarrang, Wajo. Akibat banjir tersebut sebanyak 9.031 KK dan 17.798 jiwa mengungsi dan sebagian besar dievakuasi di 29 titik pengungsian. Kerugian material akibat banjir menyebabkan 554 unit rumah terendam. Selain itu luapan air menyebabkan genangan antara 50 cm hingga 100 cm, sehingga akses dan aktivitas warga menjadi terganggu karena kendaraan tak bisa melintas.

Tabel 4.7 Data Kejadian Bencana Alam Banjir, Genangan Air dan Angin Kencang Kota Makassar Tahun 2019.

No	Jenis	Kecamatan	Keluara	Lokasi	Jumlah Pengungsi	Ket/Objek
----	-------	-----------	---------	--------	------------------	-----------

1		g	g	Kesadara n															
12 2	Banjir	Panakkukan g	Pnaikang	Jl. Kesadara n Raya															Rumha
12 3	Banjir	Panakkukan g	Pandang	Jl. Adhiyaks a Baru															Rumha
12 4	Banjir	Panakkukan g	Karampu ang	Jln. Setipa Raya															Rumha
12 5	Pohon Tumbang	Panakkukan g	Masale	Jl. Adhiyaks a Baru lg. 6															Rumha
12 6	Pohon Tumbang	Panakkukan g	Karuwisi Utara	Jl. Urip Sumoharj o Lg. 2															Rumha
12 7	Pohon Tumbang	Panakkukan g	Paropo	Jl. Inspeksi Kanala															Rumha
12 8	Pohon Tumbang	Panakkukan g	Paropo	Jl. Batua Raya 12															Rumha
12 9	Pohon Tumbang	Panakkukan g	Tamama ung	Jln. Pettarani 2															Rumha
13 0	Pohon Tumbang	Panakkukan g	Panaikan g	Jl. H. Kalla															Poros Jalan
13 1	Genanga n Air	Tamalate	Mangasa	Btn Manggas a															Rumha
13 2	Banjir	Biringkana ya	Kamp Katimban g	Rumah Warga															Rumha
13 3	Banjir	Manggala	Manggal a	Prumnas Antang Blok 10															Rumha
13 4	Angin Kencang	Sangkarran g	P. Kodingar eng																Rumha
13 5	Angin Putting. B	Bontoala	Parang Layang																Rumha
13 6	Angin Putting. B	Wajo	Melayu	Jl. Muna															Rumha
13 7	Angin Putting. B	Bontoala	Parang Layang																Rumha
13 8	Angin Putting. B	Wajo	Melayu																Rumha
13 9	Pohon Tumbang	Wajo	Melayu																Rumha
14 0	Pohon Tumbang	Wajo	Butung																Rumha

Sumber: Kantor BPBD Kota Makassar Tahun 2023.

1. Profil Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa terletak pada garis bujur $5^{\circ}33,6'$ Timur dari Kutub Utara dan $12^{\circ}38,16'$ Timur dari Jakarta. Sedangkan wilayah administratifnya terletak antara 5° dan $5^{\circ}34,7'$ Lintang Selatan dari Jakarta dan $12^{\circ}33,19'$ hingga $13^{\circ}15,17'$ Bujur Timur. Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan ini dikelilingi oleh tujuh kabupaten dan kota lainnya, termasuk Kota Makassar dan Kabupaten Maros di sebelah utara. dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Kabupaten Takalar dan Jeneponto berbatasan di sebelah selatan, sedangkan kota Makassar dan Takalar berbatasan di sebelah barat.

Wilayah administratif Kabupaten Gowa seluas 1.883,33 kilometer persegi atau sekitar 3,01 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 167 desa dan 18 kecamatan. Di Kabupaten Gowa, dataran tinggi menempati sekitar 72,26 persen dari total wilayah. Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Rompio Pao, Parigi, Bungaya, Botolempangan, Tompobulu, dan Biring Bulu adalah beberapa kecamatan Sembilan yang memiliki data terkini. Di Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobulu, kemiringan lahan lebih dari 40 derajat mencapai 35,30 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa. Ada lima belas sungai besar yang mengalir melalui Kabupaten Gowa. Sungai Jeneberang yang luasnya 881 km² dan panjang 90 km memiliki luas DAS terbesar.

Hanya musim kemarau dan musim hujan yang berhubungan dengan Kabupaten Gowa. Musim hujan biasanya dimulai pada bulan Desember

dan berlangsung hingga Maret, dengan musim kemarau biasanya berlangsung dari Juni hingga September. Setelah fase transisi, keadaan ini berubah dua kali setahun, pada bulan April dan Mei serta Oktober dan November. Kabupaten Gowa mengalami curah hujan 237,75 mm dan suhu rata-rata 27,125°C. Curah hujan maksimum yang dicatat oleh banyak stasiun/pos pengamatan rata-rata 676 mm terjadi pada bulan Desember, sedangkan curah hujan terendah yang dapat diperkirakan terjadi antara bulan Juli dan September, hampir tidak ada hujan.

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Gowa terletak antara garis lintang 5°33' dan 5°34' selatan dan garis bujur 120°38' dan 120°33' timur.

Kabupaten Gowa meliputi wilayah seluas 1.883,33 km².

Batas administrasi Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kota makassar, kabupaten maros dan kabupaten bone.
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten sinjai, kabupaten bantaeng dan kabupaten jenepono.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten takalar dan kabupaten jenepono.
- Sebelah barat berbatasan dengan kota makassar dan kabupaten takalar.

Dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Gowa berkisar antara 10 hingga 2800 meter di atas permukaan laut.

Sebanyak 167 desa/kelurahan dan 726 dusun/kelurahan membentuk Kabupaten Gowa seluas 1.883,33 km², yang terbagi dalam 18 kecamatan.

Gambar 4.8: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa



Sumber: WebSite Kabupaten Gowa- Peta Administrasi Kabupaten Gowa

Ada juga Malino, destinasi wisata populer dengan pemandangan alam yang mempesona. Kawasan yang berada di ketinggian 1.500 mdpl ini memiliki hutan wisata Malino atau dikenal juga dengan hutan pinus yang tersusun dari deretan pohon pinus. pohon pinus yang tumbuh subur, kokoh dan rindang, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah kota makassar sebagai berikut:

Tabel 4.9 luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gowa Tahun 2024.

N O	Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
1	73.06.02	Bajeng	4	10	Desa	Bone Bontosunggu Lempangang Maccini Baji Maradekaya Pa'bentengang Panciro Pannyangkalang Paraikatte Tangkebajeng
2	73.06.02	Bajeng	4	10	Kelurahan	Kalebajeng Limbung Mata Allo Tubajeng
3	73.06.18	Bajeng Barat		7	Desa	Bontomanai Borimatangkasa Gentungang Kalemandalle Mandalle Manjalling Tanabangka
4	73.06.12	Barombong	2	5	Desa	Biringala Kanjilo Moncobalang Tamannyeleng Tinggimae
5	73.06.12	Barombong	2	5	Kelurahan	Benteng Somba Opu Lembang Parang
6	73.06.11	Biring Bulu	2	9	Desa	Batumalonro Baturappe Berutallasa Borimasunggu Julukanaya Lembangloe Parangloe Pencong Taring
7	73.06.11	Biring Bulu	2	9	Kelurahan	Lauwa Tonrorita

8	73.06.15	Botolempangan		8	Desa	Bontolempangan Bontoloe Bontotangnga Julumate'ne Lassa-Lassa Pa'ladingang Paranglompoa Ulujangang
9	73.06.06	Bontomaranu	3	6	Desa	Bili-Bili Mata Allo Nirannuang Pakatto Romangloe Sokkolia
10	73.06.06	Bontomaranu	3	6	Kelurahan	Bontomanai Borongloe Romang Lompoa
11	73.06.01	Bontonompo	3	11	Desa	Barembeng Bategulung Bontobiraeng Bontobiraeng Selatan Bontolangkasa Selatan Bontolangkasa Utara Bulogading Kalebarembeng Katangka Manjapai Romanglasa
12	73.06.01	Bontonompo	3	11	Kelurahan	Bontonompo Kalaserena Tamallayang
13	73.06.16	Bontonompo Selatan	1	8	Desa	Bontosunggu Jipang Pa'bundukang Salajangki Salajo Sengka Tanrara Tindang
14	73.06.16	Bontonompo selatan	1	8	Kelurahan	Bontoramba
15	73.06.09	Bungaya	2	5	Desa	Bissoloro Bontomanai Buakkang

						Mangempang Rannaloe
1 6	73.06.09	Bungaya	2	5	Kelurahan	Je'nebatu Sapaya
1 7	73.06.14	Manuju		7	Desa	Bilalang Manuju Moncongloe Pattallikang Tamalatea Tana Karaeng Tassese
1 8	73.06.07	Pallangga	4	12	Desa	Bontoala Bontoramba Bungaejaya Jenetallasa Julubori Julukanaya Julupa'mai Kampili Pallangga Panakkukang Taeng Toddotoa
1 9	73.06.07	Pallangga	4	12	Kelurahan	Mangalli Pangkabinanga Parangbanoa Tetebatu
2 0	73.06.05	Parangloe	2	5	Desa	Belabori Belapunranga Bontokassi Borisallo Lonjoboko
	73.06.05	Parangloe	2	5	Kelurahan	Bontoparang Lanna
	73.06.17	Parigi		5	Desa	Bilanrengi Jonjo Majannang Manimbahoi Sicini
	73.06.13	Pattallassang		8	Desa	Borongpa'la'la Je'nemadinging Pacellekang Pallantikang Panaikang Pattallassang Sunggumanai Timbuseng
	73.06.08	Somba Opu	14		Kelur	Batangkaluku

					ahan	Bonto-Bontoa Bontoramba Kalegowa Katangka Mawang Paccinongang Pandang- Pandang Romangpolong Samata Sungguminasa Tamarunang Tombolo Tompo Balang
	73.06.04	Tinggimonc ong	6	1	Desa	Parigi
	73.06.04	Tinggimonc ong	6	1	Kelur ahan	Bonto Lerung Bulutana Gantarang Garassi Malino Pattapang
	73.06.03	Tompobulu	2	6	Desa	Bontobuddung Datara Garing Rappoala Rappolemba Tanete
	73.06.03	Tompobulu	2	6	Kelur ahan	Cikoro Malakaji
	73.06.10	Tombolo Pao	1	8	Desa	Balassuka Bolaromang Erelembang Kanreapia Mamampang Pao Ta'binjai Tonasa
	73.06.10	Tombolo Pao	1	8	Kelur ahan	Tamaona
		TOTAL	46	121		

Sumber: 2024.

b. Keadaan Penduduk Kabupaten Gowa

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2024 tercatat kurang lebih sebanyak 785.836 jiwa mencatat kepadatan penduduk

Kabupaten Gowa sebanyak 272 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP yang mencapai 347 jiwa per kilometer persegi.

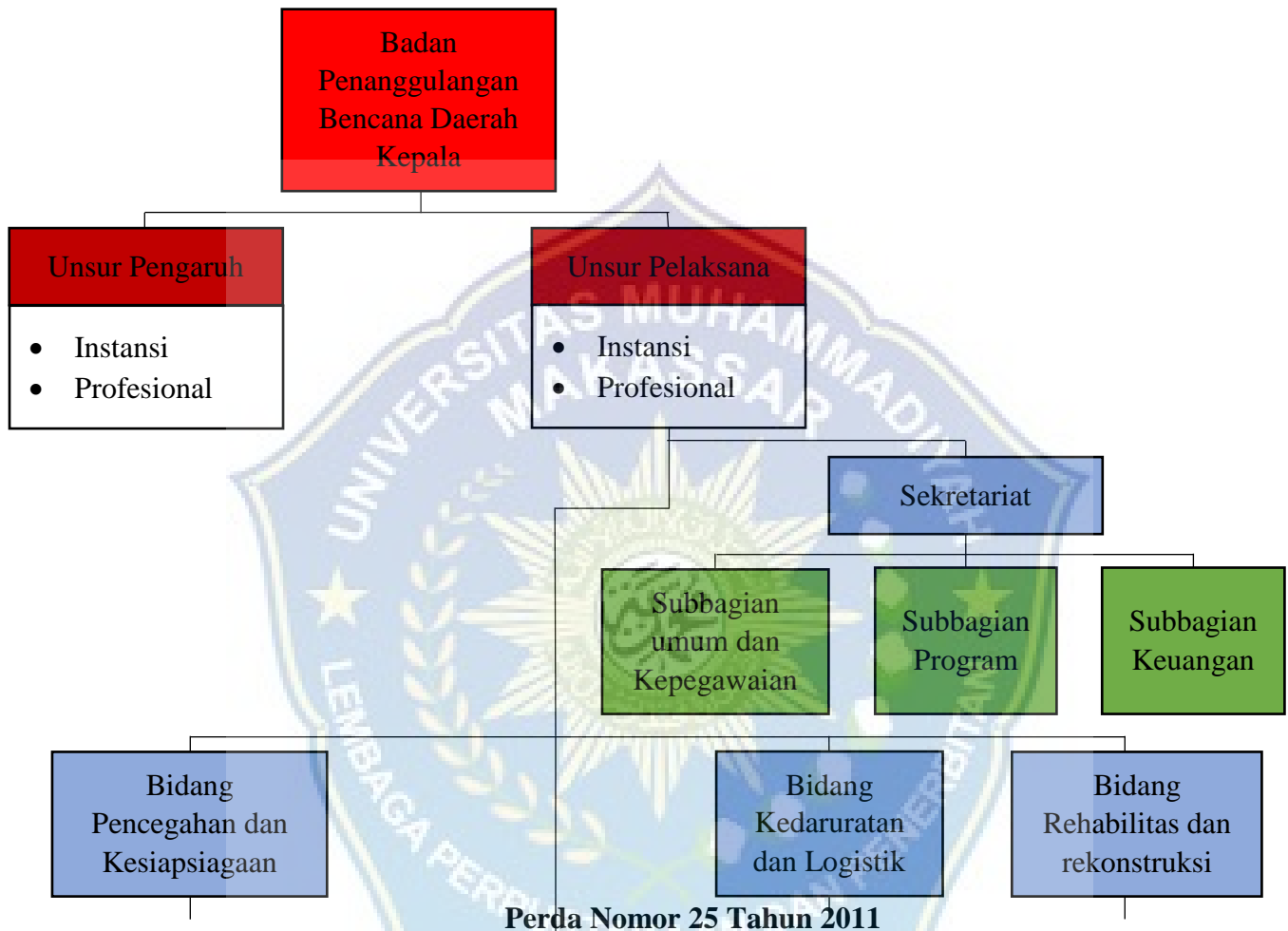
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2024.

No	Kecamatan	Laki Laki		Perempuan		Jumlah	%
		n	%	n	%		
1	BONTONOMPO	21.964	2,87	23.146	3,02	45.109	5,89
2	BAJENG	36.298	4,74	36.568	4,77	72.866	9,51
3	TOMPOBULU	14.592	1,90	14.827	1,93	29.419	3,84
4	TINGGIMONCONG	11.673	1,52	11.594	1,51	23.267	3,04
5	PARANGLOE	9.385	1,22	9.554	1,25	18.939	2,47
6	BONTOMARANNU	20.286	2,65	20.650	2,69	40.936	5,34
7	PALLANGGA	62.183	8,11	63.151	8,24	125.334	16,36
8	SOMBA OPU	75.678	9,88	76.988	10,05	152.666	19,92
9	BUNGAYA	8.627	1,13	8.969	1,17	17.596	2,30
10	TOMBOLO PAO	15.531	2,03	14.836	1,94	30.367	3,96
11	BIRING BULU	15.342	2,00	15.719	2,05	31.061	4,05
12	BAROMBONG	22.008	2,87	22.391	2,92	44.399	5,79
13	PATTALLASSANG	15.213	1,99	15.432	2,01	30.645	4,00
14	MANUJU	7.634	1,00	7.673	1,00	15.307	2,00
15	BONTOLEMPANG ANG	7.793	1,02	7.933	1,04	15.726	2,05
16	BONTONOMPO SELATAN	15.458	2,02	16.275	2,12	31.733	4,14
17	PARIGI	6.618	0,86	7.082	0,92	13.700	1,79
18	BAJENG BARAT	13.503	1,76	13.713	1,79	27.216	3,55
JUMLAH		379.786	49,57	386.501	50,42	766.286	100,00

Sumber: 2024.

- c. Struktur Organisasi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa

Tabel 4.11 Struktur Organisasi Unsur Pelaku Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa Berdasarkan



Tabel 4.12 Nama dan Jabatan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. IKHSAN PARAWANSA, M.Si	KEPALA BADAN
2	RUSTAM, S.Ag	SEKRETARIS
3	SYOFYAR MAJID, SH	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Seksi Kesiapsiagaan

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi logistik

Seksi Rekonstruksi

4	SALAHUDDIN, S.STP	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
5	DWI UYAT SAPUTRA, SE	KEPALA BIDANG REHABILITAS DAN REKONTRUKSI
6	YUSUF, SE	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7	ANDI TENRI ULANG M, S.E., M.Si	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
8	Hj. ERNI YUSNITA, SKM, M. Adm. Kes	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
9	MUSTIA MUIS, S. Ap., M.Ap	JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA
10	MUKHLIS, S. Sos	JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENAGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA
11	ASRY, SE	JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
12		JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
13	M. AKBAR M	JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA
14	SUGIHARTO, S.AP., M.AP	TENAGA ADMINISTRASI
15		TENAGA ADMINISTRASI
16	AIDA FIRNAWATY NUR, S.E	VERIFIKATOR KEUANGAN
17	SITI HAJAR, S.E	TENAGA ADMINISTRASI
18	SATRIANI	TENAGA ADMINISTRASI

d. Visi dan Misi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Gowa

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Pemerintah Kabupaten Gowa merumuskan Visi pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

1) Visi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 bahwa Visi Kabupaten Gowa adalah Terwujudnya Masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik.

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni masyarakat yang unggul, masyarakat yang tangguh, dan tata kelola pemerintahan terbaik. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang unggul dimaksudkan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong-royong, inklusif dan partisipatif. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Masyarakat yang tangguh dimaksudkan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya

perekonomian daerah dan masyarakat. Kondisi ini diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.

Tata kelola pemerintahan terbaik dimaksudkan sebagai kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Kondisi ini diukur dengan: Nilai Opini Laporan Keuangan, Nilai SAKIP dan Nilai LPPD.

2) Misi

a. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan.

1. Tujuan Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar Masyarakat.
2. Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi.
3. Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi Masyarakat perdesaan.

4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

e. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Gowa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi setiap unit

Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa. Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk

memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Rencana Strategis atau disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

RPJMD dimaksudkan juga sebagai usaha pemecahan permasalahan pembangunan yang selektif dan antisipatif bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah untuk masa 5 (lima) tahun mendatang serta merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana strategis Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah serta sasaran kabupaten yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dengan melibatkan stakeholder terkait dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka disusunlah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Data dari Pusdalops BNPB menyebutkan wilayah terdampak berada di tujuh Bontonompo, Bontonompo Selatan, Pallangga, Manuju, Bajeng, Pattallassang, Somba Opu, Barombong, Tombolo Pao, Parangloe, Manuju, Bontolempangang. Akibat banjir tersebut sebanyak 638 KK. sehingga akses dan aktivitas warga menjadi terganggu karena kendaraan tak bisa melintas.

Tabel 4.13 Data bencana Alam Tahun 2023

Tanggal	Kecamatan	Kel/Desa	Jns	KK	Jiwa
---------	-----------	----------	-----	----	------

			Bencana		
03 Januari 2023	Bontonompo	Bontonompo	Angin Kencang	19	
03 Januari 2023	Bontonompo Selatan	Tindang	Angin Kencang	2	
03 Januari 2023	Bontonompo Selatan	Sengkang	Angin Kencang	1	
03 Januari 2023	Bontonompo Selatan	Tanrara	Angin Kencang	4	
03 Januari 2023	Pallangga	Pallangga	Angin Kencang	14	
03 Januari 2023	Pallangga	Parangbanoa	Angin Kencang	11	
03 Januari 2023	Pallangga	Bontoramba	Angin Kencang	19	
03 Januari 2023	Pallangga	Julupa'Mai	Angin Kencang	2	
03 Januari 2023	Pallangga	Pangkabinanga	Angin Kencang	25	
03 Januari 2023	Pallangga	Julukanaya	Angin Kencang	5	
03 Januari 2023	Pallangga	Jenetallasa	Angin Kencang	27	
03 Januari 2023	Pallangga	Mangalli	Angin Kencang	22	
03 Januari 2023	Pallangga	Kampili	Angin Kencang	9	
03 Januari 2023	Pallangga	Bontoala	Angin Kencang	16	
03 Januari 2023	Pallangga	Panakkukang	Angin Kencang	27	
03 Januari 2023	Pallangga	Bungaejaya	Angin Kencang	3	
03 Januari 2023	Pallangga	Toddotoa	Angin Kencang	28	
03 Januari 2023	Manuju	Moncongloe	Angin Kencang	1	
03 Januari 2023	Manuju	Pattallikang	Angin Kencang	1	
03 Januari 2023	Manuju	Tamalate	Longsor	1	
03 Januari 2023	Bajeng	Mata Allo	Angin Kencang	6	
03 Januari 2023	Bajeng	Maradekaya	Angin Kencang	6	
03 Januari 2023	Bajeng	Pabbentengang	Angin Kencang	7	
03 Januari 2023	Bajeng	Limbung	Angin Kencang	14	
03 Januari 2023	Bajeng	Kalebajeng	Angin Kencang	2	
03 Januari 2023	Bajeng	Tubajeng	Angin Kencang	3	
03 Januari 2023	Bajeng	Tangkebajeng	Angin Kencang	2	
03 Januari 2023	Bajeng	Panciro	Angin Kencang	13	
03 Januari	Bajeng	Bone	Angin Kencang	9	

2023					
03 Januari 2023	Bajeng	Paraikatte	Angin Kencang	1	
03 Januari 2023	Bajeng	Pannyangkalang	Angin Kencang	11	
03 Januari 2023	Bajeng	Bontosunggu	Angin Kencang	5	
03 Januari 2023	Pattallassang	Timbuseng	Angin Kencang	10	
04 Januari 2023	Bajeng Barat	Mandalle	Angin Kencang	7	
04 Januari 2023	Bajeng Barat	Manjalling	Angin Kencang	5	
04 Januari 2023	Bajeng Barat	Bontomanai	Angin Kencang	12	
04 Januari 2023	Bajeng Barat	Borimatangkasa	Angin Kencang	4	
04 Januari 2023	Bajeng Barat	Kalemandalle	Angin Kencang	2	
04 Januari 2023	Bajeng Barat	Gentungan	Angin Kencang	4	
04 Januari 2023	Bajeng Barat	Tanabangka	Angin Kencang	1	
04 Januari 2023	Somba Opu	Batangkaluku	Angin Kencang	1	
04 Januari 2023	Bontonompo	Kalaserena	Angin Kencang	4	
04 Januari 2023	Barombong	Benteng Somba Opu	Angin Kencang	27	
04 Januari 2023	Barombong	Biringala	Angin Kencang	6	
04 Januari 2023	Barombong	Tinggimae	Angin Kencang	2	
04 Januari 2023	Barombong	Moncobalang	Angin Kencang	1	
04 Januari 2023	Barombong	Lembang Parang	Angin Kencang	4	
04 Januari 2023	Barombong	Tamanyeleng	Angin Kencang	1	
04 Januari 2023	Bontonompo Selatan	Sengka	Angin Kencang	5	
04 Januari 2023	Tombolo Pao	Erelembang	Angin Kencang	1	
04 Januari 2023	Tinggi Moncong	Parigi	Longsor	1	
05 Januari 2023	Tombolo Pao	Mamampang	Angin Kencang	3	
05 Januari 2023	Pallangga	Pallangga	Angin Kencang	4	
13 Februari 2023	Pallangga	Bungaejaya	Banjir	3	
13 Februari 2023	Tinggimoncong	Bontolerung	Longsor	2	
15 Februari 2023	Bajeng Barat	Tanabangka	Angin Kencang	10	
15 Februari 2023	Bajeng Barat	Bontomanai	Angin Kencang	1	
15 Februari 2023	Pattallassang		Angin Kencang	2	
15 Februari	Pattallassang	Jenemadinging	Angin Kencang	1	

2023					
15 Februari 2023	Pattallassang	Pattallassang	Angin Kencang	2	
15 Februari 2023	Bajeng	Mata Allo	Angin Kencang	15	
15 Februari 2023	Bajeng	Kalebajeng	Angin Kencang	5	
15 Februari 2023	Bajeng	Bone	Angin Kencang	26	
15 Februari 2023	Bajeng	Tangkebajeng	Angin Kencang	50	
20 Maret 2023	Pallangga	Julu Pamai	Angin Kencang	3	
11 April 2023	Somba Opu	Mawang	Angin Kencang	1	
11 September 2023	Tompo Bulu	Rappolembang	Angin Kencang	1	
27 September 2023	Parigi	Manimbahoi	Angin Kencang	1	
20 Agustus 2023	Parangloe	Lonjoboko	Angin Kencang	1	
15 Oktober 2023	Parangloe	Lonjoboko	Angin Kencang	1	
16 Oktober 2023	Pattallassang	Panaikang	Angin Kencang	1	
16 Oktober 2023	Pattallassang	Jenemadinging	Angin Kencang	1	3
23 Oktober 2023	Pattallassang	Pacellekang	Angin Kencang	3	
27 Oktober 2023	Tinggimoncong	Bontolerung	Angin Kencang	5	
14 November 2023	Pattallassang	Panaikang	Angin Kencang	1	
14 November 2023	Pattallassang	Pattallassang	Angin Kencang	4	
14 November 2023	Pattallassang	Pallantikang	Angin Kencang	3	
23 November 2023	Bungaya	Bontomanai	Angin Kencang	6	
23 November 2023	Somba Opu	Tamarunang	Angin Kencang	2	
23 November 2023	Parigi	Jonjo	Tersambar Petir	3	3
23 November 2023	Barombong	Tamanyeleng	Angin Kencang	4	
23 November 2023	Somba Opu	Bonto-Bontoa	Angin Kencang	1	
23 November 2023	Somba Opu	Bonto-Bontoa	Angin Kencang	1	
25 November 2023	Manuju	Pattallickang	Angin Kencang	2	
25 November 2023	Biring Bulu	Parangloe	Angin Kencang	1	3
25 November 2023	Bungaya	Mangempang	Angin Kencang	6	31
25 November 2023	Biring Bulu	Pencong	Angin Kencang	15	
26 November 2023	Bontomarannu	Borongloe	Angin Kencang	1	
27 November 2023	Pallangga	Tetebatu	Angin Kencang	1	
02 Desember	Pattallassang	Borong Palala	Angin Kencang	1	

2023					
05 Desember 2023	Bontolempangang	Paranglombo	Tersambar Petir	1	2
jumlah				638	42

Sumber: Dinas BPBD Kabupaten Gowa

Tabel 4.14 Sumber Dana Bantuan Bencana Dari Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2024

No	Uraian	Sumber Dana	Jumlah
1.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	APBD	1.731.987.900
2.	Program Peningkatan Prasarana Aparatur Penanggulangan Bencana	APBD	60.000.000
3.	Program Peningkatan SDM dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanggulangan Bencana	APBD	325.000.000

Berdasarkan sumber dana di atas menyatakan bahwa dana yang di berikan sebesar Rp. 394.866.500,- atau tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah yang diberikan kepada korban bencana gempa bumi di Kabupaten Gowa.

B. Hasil Penelitian Pada Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa

Dinas Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan amanah Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB yang merupakan lembaga non kementerian setingkat menteri yang mempunyai

fungsi meliputi perumusan penetapan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007) merupakan upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB). Selanjutnya, penyelenggaraan PB merupakan serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana melalui tiga fase, pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi.

Upaya penanggulangan bencana merupakan bentuk tanggung jawab kepada negara dalam melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 diterangkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya peran BNPB namun juga diperlukan keterlibatan peran dari Kementerian/lembaga nasional lainnya, lembaga usaha dan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional bagi Bencana Alam di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan lima (5) indikator yaitu Perencanaan Inventarisasi Kebutuhan, Pengadaan dan Penerimaan, Pergudangan dan Penyimpanan, Pendistribusian, Pengangkutan.

1. Perencanaan Inventarisasi Kebutuhan

Proses inventarisasi merupakan proses untuk mengumpulkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, dimana

letaknya, kapan barang bantuan dibutuhkan, serta bagaimana cara menyampaikan barang bantuan tersebut. Informasi yang dibutuhkan tersebut dihimpun dari laporan, Tim Reaksi Cepat, media massa, seta instansi-instansi terkait.

Dengan hal ini perencanaan inventarisasi kebutuhan mengenai pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa. Berikut wawancara penulis dengan MII Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik (BPBD) Kota Makassar terkait perencanaan inventarisasi kebutuhan sebagai berikut:

“Tentu, proses perencanaan inventarisasi kebutuhan logistik kemanusiaan dalam situasi darurat seperti bencana alam dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Pertama, kami melakukan evaluasi cepat terhadap dampak bencana untuk mengidentifikasi kebutuhan utama, kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa kebutuhan tersebut terpenuhi” (Wawancara dengan MII pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai perencanaan inventarisasi kebutuhan melibatkan identifikasi dan pemetaan kebutuhan logistik yang diperlukan untuk menangani bencana alam, seperti makanan, air bersih, tempat penampungan sementara, obat-obatan, pakaian, selimut, dan kebutuhan medis lainnya. Proses ini juga mencakup estimasi jumlah dan jenis barang yang diperlukan, serta pemetaan wilayah terdampak untuk menentukan prioritas distribusi. Dengan adanya perencanaan inventarisasi kebutuhan yang baik, diharapkan distribusi logistik dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat

membantu meringankan dampak bencana alam bagi masyarakat yang terdampak.

Berikut wawancara penulis dengan AI selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kota Makassar terkait dengan perencanaan inventarisasi kebutuhan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi skala bencana, jumlah dan kondisi para korban, aksesibilitas wilayah terdampak, serta ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan. Selain itu, kami juga mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan tambahan yang mungkin muncul selama tanggap darurat” (Wawancara dengan AI pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai perencanaan inventarisasi kebutuhan harus mempertimbangkan skala bencana yang terjadi, karena hal ini akan mempengaruhi besarnya kebutuhan logistik yang diperlukan. Jumlah dan kondisi para korban bencana juga menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan inventarisasi kebutuhan. Hal ini akan memengaruhi jenis dan jumlah barang yang harus disediakan. Ketersediaan akses ke wilayah terdampak akan mempengaruhi kemampuan untuk mendistribusikan logistik kemanusiaan dengan cepat dan efektif.

Berikut wawancara penulis dengan SH selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) KAbupaten Gowa terkait dengan perencanaan inventarisasi kebutuhan dalam pengelolaan logistik

kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“Kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, organisasi non-pemerintah, dan relawan. Koordinasi ini dilakukan melalui rapat koordinasi dan pertemuan rutin untuk memastikan bahwa semua pihak terinformasi tentang kebutuhan yang ada dan dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing” (Wawancara dengan SH pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai perencanaan inventarisasi kebutuhan dalam koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait sangat penting. Pemerintah daerah dapat memberikan informasi tentang kondisi terkini di wilayah terdampak, sementara lembaga kemanusiaan dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan bantuan logistik dan tenaga. Relawan juga dapat berperan penting dalam mendukung proses inventarisasi kebutuhan dan distribusi logistik.

Berikut wawancara penulis dengan SM selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kabupaten Gowa terkait dengan perencanaan inventarisasi kebutuhan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“Proses identifikasi kebutuhan logistik kemanusiaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan dari lapangan, data historis bencana, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan organisasi kemanusiaan lainnya. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak dan penting” (Wawancara dengan SM pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai perencanaan inventarisasi kebutuhan ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi

kebutuhan yang paling mendesak dan penting, mengenai perencanaan inventarisasi kebutuhan.

Berikut wawancara penulis dengan GN selaku Korban terkena Bencana Alam terkait dengan perencanaan inventarisasi kebutuhan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“Menurut saya, faktor-faktor seperti jumlah korban, kondisi wilayah terdampak, dan kebutuhan mendesak harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan inventarisasi kebutuhan. Selain itu, koordinasi antara pihak terkait juga sangat penting agar logistik dapat tersalurkan dengan baik.” (Wawancara dengan GN pada 24 Januari 2024).

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait perencanaan inventarisasi kebutuhan Jumlah korban dari bencana menjadi faktor kunci dalam menentukan kebutuhan logistik yang harus dipenuhi. Semakin besar jumlah korban, semakin besar pula kebutuhan akan bantuan logistik.

2. Pengadaan dan Penerimaan

Proses penerimaan/pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.

Dengan hal ini Pengadaan dan Penerimaan mengenai pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota

Makassar Dan Kabupaten Gowa. Berikut wawancara penulis dengan MII selaku Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik (BPBD) Kota Makassar terkait Pengadaan dan Penerimaan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Proses pengadaan logistik kemanusiaan dalam konteks lintas regional dilakukan dengan melakukan identifikasi kebutuhan bersama dengan pihak terkait dari wilayah-wilayah terdampak. prosesnya itu kami memang mengusul di dalam APBD Kota Makassar di rancang sedemikian rupa setelah itu turun anggarannya ke BPBD setelah itu kami pengadaan lewat pihak ketiga di lelang. Dan Kami kemudian melakukan pengadaan logistik tersebut baik melalui sumber daya internal maupun melalui kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga kemanusiaan, pemerintah daerah, dan donatur” (Wawancara dengan MII pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengadaan dan Penerimaan di usulkan di dalam APBD Kota Makassar dan kemudian di rancang sedemikian rupa setelah turun anggaran ke BPBD Kota Makassar.

Berikut wawancara penulis dengan AI selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kota Makassar terkait dengan Pengadaan dan Penerimaan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama antara lain adalah kecepatan dalam pengadaan, ketersediaan sumber daya, kebutuhan mendesak, serta kemampuan untuk menjangkau wilayah-wilayah terdampak. Kami juga mempertimbangkan aspek kualitas dan keamanan dari logistik yang akan diada dan Padasaat keadaan mendesak seperti keadaan banjir tiba tiba selama logistik kami ada langsung kita turunkan juga jadi padasaat misalnya malam tiba tiba ada bencana kita langsung turunkan ke titik lokasi bencana dan kami disini di BPBD 24 jam ada yang berposko dan ada juga di karester dan ada di tiga titik seperti manggala, ujung tanah dan tamalanrea. Jadi mereka semua di beberapa wilayah mencakupi lokasi lokasi yang terdekat misalnya ujung tanah ada kejadian di Somba Opu karester ujung tanah yang tangani dulu setelah itu kami turun sama sama dengan posko di kantor BPBD dan kami turunkan juga logistik” (Wawancara dengan AI pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengadaan dan Penerimaan selagi persediaan logistik masih ada BPBD Kota Makassar turunkan langsung ke lokasi terdampak bencana alam.

Berikut wawancara penulis dengan SH selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kabupaten Gowa terkait dengan Pengadaan dan Penerimaan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“kami melakukan proses penerimaan yang meliputi pemeriksaan kualitas, kuantitas, dan keamanan barang. Selanjutnya, logistik tersebut didistribusikan ke wilayah-wilayah terdampak sesuai dengan prioritas dan urgensi kebutuhan” (Wawancara dengan SH pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengadaan dan Penerimaan Pengadaan logistic biasanya di dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan kondisi di lokasi bencana.

Berikut wawancara penulis dengan SM selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kabupaten Gowa terkait dengan

Pengadaan dan Penerimaan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Proses penerimaan logistik dilakukan dengan memastikan bahwa barang-barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan dan dalam kondisi yang baik. Setelah itu, barang-barang tersebut disimpan dengan rapi untuk kemudian didistribusikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.” (Wawancara dengan SM pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengadaan dan Penerimaan Seperti pemberian logistic awal seperti makanan dan minuman tidak lupa juga tenda pengungsi di siapkan untuk Masyarakat yang terdampak bencana alam.

Berikut wawancara penulis dengan GN selaku Korban terkena Bencana Alam terkait dengan Pengadaan dan Penerimaan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Proses pengadaan bantuan logistik kemanusiaan dilakukan dengan cukup baik. Bantuan-bantuan tersebut didistribusikan oleh pihak terkait melalui berbagai jalur transportasi, seperti truk dan kapal. Meskipun ada beberapa kendala seperti aksesibilitas wilayah yang terbatas, namun bantuan tersebut tetap dapat sampai kepada kami.” (Wawancara GN dengan pada 24 Januari 2024).

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Pengadaan dan Penerimaan Penerimaan bantuan logistic bencana alam di berikan kepada kordinator kemudian di serahkan kepada masing masing kordinator kelompok pengungsi bencana alam untuk bisa efektif dan efisien Masyarakat yang terdampak bencana alam.

3. Pergudangan dan Penyimpanan

Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.

Pencatatan data penerimaan antara lain: jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metode barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (*first-in first-out*) dan atau menggunakan metode *last-in first-out*.

Dengan hal ini Pergudangan dan Penyimpanan mengenai pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa. Berikut wawancara penulis dengan MII selaku Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik (BPBD) Kota Makassar terkait Pergudangan dan Penyimpanan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Proses pergudangan dan penyimpanan logistik kemanusiaan dalam konteks lintas regional dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti Kami punya yang betul betul memungkinkan untuk menyimpan logistik dengan baik jadi padasaat hujan terus angin kencang logistik kami tersimpan dengan baik di tempat yang aman dan memang gudang kami betul betul persentatif, jadi pada saat di butuhkan logistik kami bisa langsung menurunkan barang barang yang kami simpan di gudang. dan keamanan barang, kondisi lingkungan, dan kemampuan untuk menjangkau wilayah-wilayah terdampak. Kami biasanya menggunakan gudang-gudang yang telah disiapkan sebelumnya di berbagai lokasi strategis untuk penyimpanan logistik tersebut” (Wawancara dengan MII pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pergudangan dan Penyimpanan BPBD Kota Makassar sudah menyiapkan gudang penyimpanan logistik yang aman dan juga strategis.

Berikut wawancara penulis dengan AI selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kota Makassar terkait dengan Pergudangan dan Penyimpanan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Kami di BPBD kota makassar punya pencatatan padasaat masuknya logistic dan pengeluarannya logistic dari pihak ketiga dan juga kami hitung sesuai dengan cuannya dan logistic itu di serahkan ke Masyarakat sesuai dengan peruntukannya” (Wawancara dengan AI pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pergudangan dan Penyimpanan BPBD Kota Makassar menghitung masuk dan keluarnya barang agar sesuai sasaran dan target penurunan logistik ke masyarakat yang terdampak bencana alam.

Berikut wawancara penulis dengan SH selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) KAbupaten Gowa terkait dengan Pergudangan dan Penyimpanan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Setelah logistik tiba di gudang, kami melakukan proses penerimaan yang meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang. Selanjutnya, logistik tersebut disusun dan disimpan dengan rapi sesuai dengan jenisnya dan prioritas kebutuhan. Kami juga melakukan pemantauan terhadap kondisi logistik secara berkala untuk memastikan keamanan dan ketersediaan barang” (wawancara dengan SH pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pergudangan dan Penyimpanan logistik di kantor BPBD di cek berkala untuk memastikan

kualitas barang maupun makanan sebelum logistik di turunkan ke masyarakat yang terdampak bencana alam.

Berikut wawancara penulis dengan SM selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kabupaten Gowa terkait dengan Pergudangan dan Penyimpanan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Koordinasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, TNI dan petugas pemerintahan terkait, Kami juga melakukan komunikasi rutin dengan pihak yang menangani pergudangan untuk memastikan bahwa proses pergudangan dan penyimpanan logistik berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan.” (Wawancara dengan SM pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pergudangan dan Penyimpanan Koordinasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi non-pemerintah. Kami juga melakukan komunikasi rutin dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pergudangan dan penyimpanan logistik berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan.

Berikut wawancara penulis dengan GN selaku Korban terkena Bencana Alam terkait dengan Pergudangan dan Penyimpanan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Saya rasa penting untuk terus meningkatkan koordinasi antarpihak terkait dalam hal pergudangan dan penyimpanan logistik kemanusiaan. Selain itu, perlu juga ditingkatkan pemantauan terhadap kondisi gudang dan inventarisasi logistik yang tersedia agar dapat memastikan bahwa logistik dapat tersedia dengan baik ketika dibutuhkan.” (Wawancara GN dengan pada 24 Januari 2024).

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Pergudangan dan Penyimpanan logistik di simpan di gudang yang aman dan di catat masuknya logistik dan keluarnya logistik dan memastikan logistik yang masuk ke gudang sesai kualitas dan kuantitas yang baik.

4. Pendistribusian

Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.

Perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.

Dengan hal ini Pendistribusian mengenai pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa. Berikut wawancara penulis dengan MII Selaku Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik (BPBD) Kota Makassar terkait Pendistribusian dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Proses pendistribusian logistik kemanusiaan dalam konteks lintas regional dilakukan dengan merencanakan rute distribusi yang efisien untuk mencapai wilayah-wilayah terdampak. Kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Kepolisian dan TNI untuk memastikan bahwa logistik

*didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada”
(Wawancara dengan MII pada 24 Januari 2024).*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pendistribusian diawali dengan merencanakan rute distribusi yang efisien untuk memudahkan pendistribusian ke wilayah wilayah terdampak.

Berikut wawancara penulis dengan AI Selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kota Makassar terkait dengan Pendistribusian dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

*“Dengan respon cepat itu assessment teman teman di lapangan dan di beberapa karester itu kami cepat dan informasi dari Masyarakat itulah Kerjasama kita dengan tokoh Masyarakat dan Masyarakat setempat yang terjadi bencana dan respon Masyarakat dengan penyerahan logistic tepat waktu”
(Wawancara dengan AI pada 24 Januari 2024).*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pendistribusian pemerintah berkerjasama dengan tokoh masyarakat, dan masyarakat terdampak untuk memudahkan petugas untuk pendistribusian logistik.

Berikut wawancara penulis dengan SH selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) KABUPATEN GOWA terkait dengan Pendistribusian dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“BPBD maupun BNPB menyiapkan ruti yang bisa di lalui dengan cepat seperti jalur udara dengan menggunakan pesawat TNI yang memudahkan petugas BPBD Kabupaten Gowa mengakses lokasi bencana alam” (Wawancara dengan SH pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan jalur udarah dengan menggunakan

pesawat TNI untuk memudahkan petugas mengakses lokasi lokasi yang sulit di lalui dengan menggunakan jalur darat.

Berikut wawancara penulis dengan SM selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kabupaten Gowa terkait dengan Pendistribusian dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

*“Adanya penyaluran logistic yang tidak melalui kordinasi pemerintah yang Dimana penyaluran logistic harus di salurkan dengan satu pintu seperti kordinasi dengan pemerintah setempat”
(Wawancara dengan SM pada 24 Januari 2024).*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pendistribusian harus melalui satu pintu yang di kordinasikan ke pemerintah setempat atau BPBD Kabupaten Gowa.

Berikut wawancara penulis dengan GN selaku Korban terkena Bencana Alam terkait dengan Pendistribusian dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

*“Saya berharap agar distribusi logistik kemanusiaan lintas regional di masa mendatang dapat lebih efektif dan efisien. Saya juga berharap agar distribusi logistik dapat lebih cepat sampai kepada para korban bencana agar dapat membantu mereka dalam menghadapi situasi sulit akibat bencana alam.”
(Wawancara GN dengan pada 24 Januari 2024).*

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Pendistribusian di awali dengan merencanakan rute distribusi yang efisien untuk memudahkan pendistribusian ke wilayah wilayah terdampak bencana alam dan dilakukan menggunakan jalur udarah dengan menggunakan pesawat TNI untuk memudahkan petugas mengakses lokasi

lokasi yang sulit di lalui dengan menggunakan jalur darat dan harus melalui satu pintu yang di kordinasikan ke pemerintah setempat.

5. Pengangkutan

Proses pengangkutan dilakukan berdasarkan hasil perencanaan pendistribusian. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah: jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima. Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.

Dengan hal ini Pengangkutan mengenai pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa. Berikut wawancara penulis dengan MII selaku Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik (BPBD) Kota Makassar terkait Pengangkutan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Kami ada beberapa unit kendaraan perahu politeling, perahu karet untuk pengangkutan logistic dan padasaat turun kelapangan untuk menurunkan logistic di titik titik lokasi bencana tersalurkan dengan baik dengan adanya beberapa kendaraan yang kami punya di kantor BPBD Kota Makassar” (Wawancara dengan MII pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengangkutan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dalam pengelolaan pengangkutan logistik kemanusiaan lintas regional, kami mempunyai 4

unit perahu karet, perahu politeling 3 unit di titik bencana seperti biringkanaya dan manggala.

Berikut wawancara penulis dengan AI selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kota Makassar terkait dengan Pengangkutan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Padasaat informasi datang dari beberapa posko karester setelah assessment kami turunkan langsung logistic dengan kendaraan kami yang berada di kantor BPBD Kota Makassar dengan pengangkutan ini sesuai kebutuhan yang ada di lokasi bencana” (Wawancara dengan AI pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengangkutan teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam mendukung pengelolaan pengangkutan logistik lintas regional. Kami menggunakan sistem informasi untuk memantau dan mengkoordinasikan pengangkutan logistik, serta untuk berkomunikasi dengan pihak terkait. Hal ini membantu kami dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam manajemen pengangkutan.

Berikut wawancara penulis dengan SH selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) KAbupaten Gowa terkait dengan Pengangkutan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Sistem komunikasi dan sistem GPS yang memudahkan untuk pemantauan logistic untuk menuju ke Masyarakat yang terkena bencana alam” (Wawancara dengan SH pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengangkutan GPS dapat digunakan untuk pemantauan pengiriman logistik kemanusiaan ke daerah-daerah yang sulit diakses atau terisolasi akibat bencana alam.

Berikut wawancara penulis dengan SM selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Kabupaten Gowa terkait dengan Pengangkutan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut:

“Kami sekarang ini mempunyai alat angkut yang cukup memadai, dan kedepannya kami ingin menambah alat angkut logistic dan Masyarakat bisa tertolong dengan cepat dengan adanya angkutan kami dan padasaat bencana alam contohnya misalnya banjir alat transportasi kami siap mengantar ke lokasi titik bencana yang terjadi.” (Wawancara dengan SM pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengangkutan BPBD mempunyai alat angkut yang memadai untuk pengangkutan logistik ke tempat tempat yang sulit di akses.

Berikut wawancara penulis dengan GN selaku Korban terkena Bencana Alam terkait dengan Pengangkutan dalam pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam sebagai berikut

“Saya rasa penting untuk terus meningkatkan koordinasi antarpihak terkait dalam hal pengangkutan logistik kemanusiaan. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa logistik dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran kepada para korban bencana. Selain itu, juga perlu ditingkatkan pemantauan terhadap kondisi transportasi dan cuaca untuk menghindari kendala yang tidak diinginkan.” (Wawancara GN dengan pada 24 Januari 2024).

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Pengangkutan memastikan keberlanjutan dan peningkatan dalam pengelolaan pengangkutan logistik kemanusiaan lintas regional, kami

mempunyai 4 unit perahu karet, perahu politeling 3 unit di titik bencana seperti biringkanaya dan manggala dan GPS dapat digunakan untuk pemantauan pengiriman logistik kemanusiaan ke daerah-daerah yang sulit diakses atau terisolasi akibat bencana alam.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa menggunakan Lima (5) indikator teori yaitu:

1. Perencanaan Inventarisasi Kebutuhan

Proses inventarisasi merupakan proses untuk mengumpulkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, dimana letaknya, kapan barang bantuan dibutuhkan, serta bagaimana cara menyampaikan barang bantuan tersebut. Informasi yang dibutuhkan tersebut dihimpun dari laporan, Tim Reaksi Cepat, media massa, seta instansi-instansi terkait.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Perencanaan Inventarisasi Kebutuhan identifikasi berbagai jenis bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah yang dilayani oleh lintas regional. Ini mencakup pemahaman tentang potensi kerusakan yang mungkin terjadi, wilayah yang rentan, dan dampak sosial-ekonomi yang dapat timbul. di Lakukan analisis mendalam tentang kebutuhan logistik kemanusiaan yang mungkin timbul selama dan setelah bencana. Ini

melibatkan identifikasi jenis logistik yang diperlukan, seperti makanan, air bersih, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan medis.

2. Pengadaan dan Penerimaan

Proses penerimaan/pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Pengadaan dan Penerimaan di usulkan di dalam APBD Kota Makassar dan kemudian di rancang sedemikian rupa setelah turun anggaran ke BPBD Kota Makassar. Pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab untuk menerima logistik kemanusiaan. Tim ini harus terdiri dari orang-orang yang terlatih dan memiliki pengetahuan tentang prosedur penerimaan logistik. Pemantauan dan pengawasan ketat terhadap proses penerimaan logistik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang diharapkan dan dalam kondisi baik. Pencatatan detail mengenai barang yang diterima, termasuk jenis barang, jumlah, kondisi, dan asal barang. Data ini penting untuk keperluan pelaporan dan akuntabilitas.

3. Pergudangan dan Penyimpanan

Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu. Pencatatan data penerimaan antara lain: jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metode barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (*first-in first-out*) dan atau menggunakan metode *last-in first-out*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Pergudangan dan Penyimpanan BPBD Kota Makassar dan BPBD Kabupaten Gowa memilih lokasi gudang yang strategis dan aman dari risiko bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau tanah longsor. Menggunakan sistem penyimpanan yang efisien, seperti rak penyimpanan, untuk mengoptimalkan ruang dan memudahkan aksesibilitas barang. Memastikan keamanan gudang dengan menggunakan sistem pengamanan yang memadai, seperti kamera pengawas, alarm kebakaran, dan keamanan fisik. Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pergudangan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola gudang logistik kemanusiaan.

4. Pendistribusian

Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data

pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Pendistribusian Tim respons bencana melakukan evaluasi awal untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan yang diperlukan berdasarkan skala dan jenis bencana. Merencanakan rute distribusi yang efisien dan aman untuk mencapai daerah terdampak. Ini melibatkan identifikasi titik distribusi, penentuan jenis transportasi yang sesuai, dan estimasi waktu tempuh. Mengumpulkan bantuan dari berbagai sumber, termasuk donasi masyarakat, perusahaan, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah. Melakukan distribusi bantuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ini melibatkan penggunaan transportasi yang sesuai dan pengaturan logistik lainnya, seperti penyaluran bantuan kepada relawan atau agen distribusi lokal.

5. Pengangkutan

Proses pengangkutan dilakukan berdasarkan hasil perencanaan pendistribusian. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah: jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang

bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima. Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Pengangkutan Jarak antara pusat distribusi dengan daerah terdampak dan aksesibilitas jalur transportasi menjadi faktor utama dalam memilih metode pengangkutan. Metode darat, udara, atau laut dipilih berdasarkan jarak dan kondisi aksesibilitas. Tingkat kecepatan pengiriman bantuan sangat penting, terutama dalam situasi darurat dan keadaan yang memerlukan respons cepat. Metode pengangkutan yang dapat memberikan waktu tempuh yang singkat harus diprioritaskan. Kondisi geografis daerah terdampak, seperti medan yang sulit atau kondisi cuaca yang ekstrem, akan mempengaruhi pilihan metode pengangkutan yang tepat. Metode yang dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut harus dipilih. Aspek biaya juga menjadi faktor penting dalam pemilihan metode pengangkutan. Metode yang efisien secara biaya harus dipertimbangkan agar pengeluaran dapat diminimalkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan logistik kemanusiaan melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa, maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Inventarisasi Kebutuhan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan inventarisasi kebutuhan merupakan langkah krusial dalam pengelolaan logistik kemanusiaan untuk bencana alam di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Perencanaan yang matang dan akurat akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan bantuan, serta mempercepat proses distribusi.

Perencanaan inventarisasi kebutuhan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi antar berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pihak swasta, dan organisasi masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan logistik kemanusiaan tercakup dengan baik dan efisien.

Selain itu, perencanaan inventarisasi kebutuhan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan logistik, seperti karakteristik bencana alam yang terjadi, kondisi geografis

dan demografis wilayah terdampak, serta ketersediaan sumber daya yang ada.

2. Pengadaan dan Penerimaan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengadaan dan Penerimaan Penting untuk melakukan pengadaan logistik kemanusiaan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa barang yang diperlukan tersedia dan siap didistribusikan saat dibutuhkan.

Proses penerimaan logistik kemanusiaan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terorganisir. Pihak yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan, dalam kondisi baik, dan dapat segera didistribusikan ke lokasi yang membutuhkan.

Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengadaan dan penerimaan logistik kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses tersebut serta memperbaiki kekurangan yang ada untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. pengelolaan logistik kemanusiaan melalui lintas regional bagi bencana alam di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa perlu memperhatikan aspek pengadaan dan penerimaan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan bencana.

3. Pergudangan dan Penyimpanan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pergudangan dan Penyimpanan Pergudangan dan Penyimpanan BPBD Kota Makassar dan BPBD Kabupaten Gowa memilih lokasi gudang yang strategis dan aman dari risiko bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau tanah longsor. Menggunakan sistem penyimpanan yang efisien, seperti rak penyimpanan, untuk mengoptimalkan ruang dan memudahkan aksesibilitas barang. Memastikan keamanan gudang dengan menggunakan sistem pengamanan yang memadai, seperti kamera pengawas, alarm kebakaran, dan keamanan fisik. Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pergudangan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola gudang logistik kemanusiaan.

4. Pendistribusian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendistribusian Pentingnya koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait dalam proses pendistribusian logistik kemanusiaan. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa bantuan dapat sampai tepat waktu dan tepat sasaran.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendistribusian logistik kemanusiaan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengiriman bantuan. Penggunaan aplikasi atau sistem informasi dapat membantu memantau dan mengontrol proses distribusi secara lebih efektif. Pemetaan daerah terdampak bencana alam perlu dilakukan secara detail untuk

memastikan bahwa bantuan didistribusikan sesuai dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

5. Pengangkutan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengangkutan Pentingnya ketersediaan transportasi yang cukup dan sesuai untuk mengangkut logistik kemanusiaan ke daerah terdampak. Transportasi yang memadai akan memastikan bantuan dapat sampai tepat waktu.

Diperlukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap proses pengangkutan logistik kemanusiaan untuk memastikan keamanan dan kecepatan pengiriman. Sistem pelacakan dapat membantu memantau lokasi dan kondisi transportasi.

Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan transportasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), dapat membantu dalam memperluas jangkauan pengangkutan logistik kemanusiaan dan mempercepat proses distribusi.

Dalam kondisi tertentu, penggunaan transportasi darat, laut, dan udara dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mengangkut logistik kemanusiaan. Pemilihan transportasi harus mempertimbangkan kecepatan, kapasitas, dan kondisi geografis daerah terdampak. Penyediaan jalur darurat untuk transportasi dapat membantu mengatasi hambatan dan mempercepat distribusi logistik kemanusiaan ke daerah terisolasi atau sulit dijangkau.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan maka Penulis perlu untuk menambahkan informasi berikut setelah mempertimbangkan dan menganalisa kesimpulan yang dinyatakan di atas dan hasil diskusi pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan logistik kemanusiaan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan saat terjadi bencana alam.
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat mengenai penanggulangan bencana alam, termasuk cara mengelola logistik kemanusiaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan yang terarah.
3. Perlu adanya pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan logistik kemanusiaan, seperti gudang penyimpanan logistik dan jaringan transportasi yang baik.
4. Perlu adanya pengembangan teknologi informasi yang dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengelolaan logistik kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, y. (2022). Aktivis-pemkot palembang bahas kesiapsiagaan banjir. Sumsel.antaranews.com.<https://sumsel.antaranews.com/berita/682745/aktivis-pemkot-palembang-bahas-kesiapsiagaan-atasi-banji>
- Abdussamad, z. (2021). Metode penelitian kualitatif (p. Rapanna (ed.); cetakan 1).
- Adiyoso, w. (2018). Manajemen bencana pengantar & isu-isu strategis (r. A. Kusumaningtyas (ed.)).
- Apriawan, m., faisal, m., & hadi, s. (2016). Analisis penentuan prioritas pengendalian logistik bencana di sulawesi tengah. *Jurnal ilmu manajemen universitas tadulako (jimut)*.
- Apriawan, m., faisal, m., & hadi, s. (2016). Analisis penentuan prioritas pengendalian logistik bencana di sulawesi tengah. *Jurnal ilmu manajemen universitas tadulako (jimut)*.
- Badan nasional penanggulangan bencana. (2008). Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 13, tahun 2008 tentang pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- Badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) provinsi sumatera selatan. (2021). Rencana penanggulangan bencana (rpb) provinsi sumatera selatan tahun 2022-2026 (issue 23).
- Beck, t. J., petit, m. A., wu, g., leboff, m. S., cauley, j. A., & chen, z. (2009). Does obesity really make the femur stronger? Bmd, geometry, and fracture incidence in the women's health initiative- observational study. *Journal of bone and mineral research*.
- Bnbp. (2022). Bnbp verifikasi 5.402 kejadian bencana sepanjang tahun 2021.[https://bnpb.go.id/berita/bnbp-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjangtahun-2021#:~:text=bnpb verifikasi 5.402 kejadian bencana sepanjang tahun 2021, -kamis%2c 17 pebruari&text=jumlah kejadian tersebut didominasi antara,dan 1 erupsi gunung api](https://bnpb.go.id/berita/bnbp-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjangtahun-2021#:~:text=bnpb%20verifikasi%205.402%20kejadian%20bencana%20sepanjang%20tahun%202021,-kamis%2c%2017%20pebruari&text=jumlah%20kejadian%20tersebut%20didominasi%20antara,dan%201%20erupsi%20gunung%20api).
- Bnbp. (2019). Sistem manajemen logistik penanggulangan bencana harus optimal.
- Darwati, d., & wekke, i. S. (2019). Collaborative governance dalam pengelolaan integrated community shelter pasca bencana di kota palu.
- Damayanti, s. D., catur, s., & kendari, s. (2021). Dengan menggunakan metode simple additive weighting (saw).
- Direktorat jenderal pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung (dashl). (2009). Peraturan direktur jenderal rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial nomor : p.04/v-set/2009 tanggal: 05 maret 2009 tentang pedoman monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai.
- Dwiantara, l., & sumarto, r. H. (2004). Manajemen logistik. *Jakarta: grasindo*.
- Fransiska, y., herawati, y. T., & witcahyo, e. (2013). Efektivitas penyusunan perencanaan anggaran logistik melalui pendekatan participatory di rsud dr . Mohamad saleh kota probolinggo (the effectiveness of budget logistic planning through participatory approach in rsud dr. Mohamad saleh of probolinggo city. *Ilmiah hasil penelitian mahasiswa*.
- Hidayat, R. D. R., Firdaus, M. I., & Lesmini, L. (2018). Pengelolaan gudang logistik kemanusiaan bnbp. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*.

- Mahdia, f., & noviyanto, f. (2013). *Pemanfaatan google maps api untuk pembangunan sistem informasi manajemen bantuan logistik pasca bencana alam berbasis mobile web (studi kasus: badan penanggulangan bencana daerah kota yogyakarta)* (doctoral dissertation, universitas ahmad dahlan).
- Mimin, a., paripurno, e. T., & lestari, p. (2020). Analisis pengelolaan logistik dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di bpbd kabupaten sumbawa 2018. *Jurnal mineral, energi, dan lingkungan*.
- Stock, j. R., & lambert, d. M. (2001). *Strategic logistics management* (vol. 4). Boston, ma: mcgraw-hill/irwin.
- Van wassenhove, l. N. (2006). Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. *Journal of the operational research society*.
- Wibawa, p. T., farida, n., & listyorini, s. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan, harga dan promosi terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pt. Matahari silverindo jaya semarang. *Jurnal ilmu administrasi bisnis*.
- Woo, s. H., pettit, s., beresford, a., & kwak, d. W. (2012). Seaport research: a decadal analysis of trends and themes since the 1980s. *Transport reviews*.



L

A

M

P

I

R

A

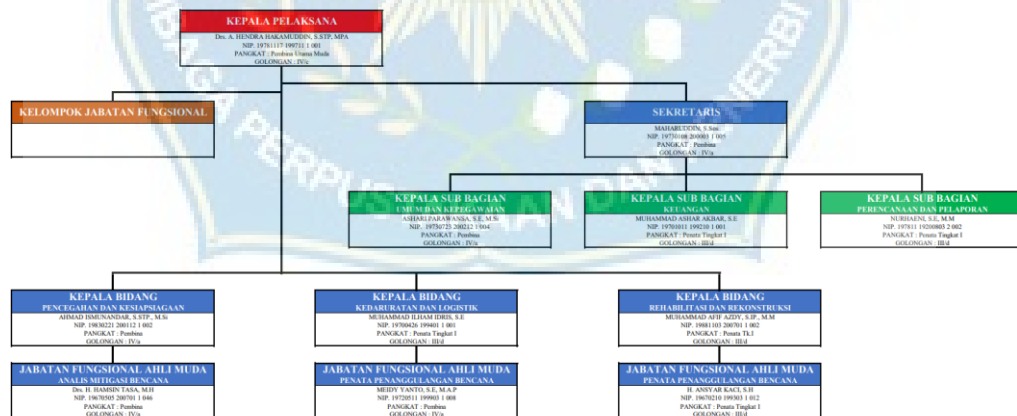
N





**wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD)
Kota Makassar 24 Januari 2024.**

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2024**



**Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Makassar Tahun 2024.**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 1375/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	1. Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	2. Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3436/05/C.4-VIII/W/1445/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: AGUNG DANASWARA DAUD
Nomor Pokok	: 10564 1101420
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No.259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGELOLAAN LOGISTIK KEMANUSIAAN MELALUI LINTAS REGIONAL BAGI BENCANA ALAM DI KOTA MAKASSAR DAN KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Januari s/d 22 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peringkat.

Surat Izin Penelitian Tahun 2024.

Agung Danaswara Daud 105641101420 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	5%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	5%
2	jurnal.upnyk.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Agung Danaswara Daud 105641101420 BAB II

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

8%

2

dormaniperonika.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

Agung Winardi 105731117320 BAB III

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bappeda.tangerangselatankota.go.id Internet Source	2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	www.rctiplus.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
 Exclude bibliography Off



Agung Danaswara Daud 105641101420 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	gowakab.go.id Internet Source	3%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	dinsos.mageetan.go.id Internet Source	2%
4	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	2%
5	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

Agung Danaswara Daud 105641101420 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ibik.ac.id

Internet Source

1%

2

www.airnavindonesia.co.id

Internet Source

1%

3

123dok.com

Internet Source

1%

4

eduwinekofranjaya.wordpress.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



RIWAYAT HIDUP



Agung Danaswara Daud di lahirkan tanggal 18 Agustus 2001 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Putra dari pasangan H. Daud Mustafa Kasim dan Dra. Hj. Husnah Lanu, M.Pd. Peneliti memulai jenjang Pendidikan di SD Muhammadiyah Kota Sorong pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun itu juga melanjutkan Pendidikan ke MTS NEGERI MODEL Kota Sorong dan tamat pada tahun 2016. Lalu melanjutkan Pendidikan ke SMK NEGERI 1 Kota Sorong dan menyelesaikan Pendidikan pada tahun 2019. Dengan izin Allah, pada tahun 2019 peneliti kemudian melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi dan alhamdulillah peneliti berhasil di terima dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Strata (S1). Pada tahun 2024 penulis menyusun tugas akhir dengan judul Skripsi *“Pengelolaan Logistik Kemanusiaan Melalui Lintas Regional Bagi Bencana Alam Di Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa”*.